PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Anief Khaefatun Nisa
NIM: 2105026072

S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Anief Khaefatun Nisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama	:	Anief Khaefatun Nisa
NIM	:	2105026072
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Sokhikhatul Mawadah, M.E.I	Arief Darmawan, M.Pd.
NIP. 198503272018012001	NIP. 198804222020121002

LEMBAR PENEGSAHAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama	: Anief Khaefatun Nisa
NIM	: 2105026072
Jurusan	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: "Pengaruh Upah Minumum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024"

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 20 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 07 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekertaris Sidang
Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak.	**Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.**
NIP. 198710102019032017	**NIP. 198503272018012001**
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.	**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.**
NIP. 19730811200003	**NIP. 197512182005011002**
Pembimbing I	Pembimbing II
Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.	**Arief Darmawan, M.Pd.**
NIP. 198503272018012001	**NIP. 19880422202121002**

MOTTO

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: "*Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.*"

(QS. Az-Zariat :19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimussholihaat. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Dengan rasa syukur dan kebanggaan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang mungkin hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar, tapi memiliki kebijaksanaan dan keteguhan hati yang luar biasa. Yang mungkin tak sering bertanya "Bagaimana kuliahmu?", namun dalam diam, tanpa keluh, selalu berusaha bahkan di luar batas kemampuan demi memastikan segala kebutuhan terpenuhi. Kalian membuktikan bahwa kasih sayang tidak selalu terucap melalui kata-kata, melainkan diwujudkan melalui pengorbanan dan ketulusan yang selalu hadir dalam setiap langkah. Terima kasih karena terus percaya, bahwa anak kalian pantas untuk bermimpi lebih tinggi. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat-lipat kebahagiaan dan keberkahan rezeki.
2. Kedua adik saya, Arfan dan Arsya yang masih sibuk belajar perkalian dan main layang-layang, yang belum paham apa itu skripsi. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh harapan.
3. Teruntuk diri sendiri, Anief Khaefatun Nisa yang telah berjuang sejauh ini, melewati rasa lelah, ragu dengan segala keterbatasan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, meski terkadang merasa sendiri dalam perjalanan ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang terus dijalani, pada akhirnya akan membawa pada tujuan besar yang layak diperjuangkan.
4. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah. Terima kasih atas dukungan yang tulus, yang menjadi kekuatan dalam menjalani perjalanan menuju cita-cita.
5. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Arief Darmawan, M.Pd., sebagai dosen pembimbing II yang dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian telah membimbing selama proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman satu angkatan tahun 2021 terkhusus Ekonomi Islam B yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, berbagi tawa, lelah, dan perjuangan semasa kuliah. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang menguatkan hingga titik akhir perjuangan ini.
7. Teruntuk teman-teman KKN Posko 109 Angkatan 2021, keluarga besar KPMDB UIN Walisongo, serta sahabat-sahabatku BOLI, terima kasih atas support dan kebersamaannya.
8. Sahabat saya Zahra Shabira, terima kasih atas rasa kekeluargaan yang diberikan, serta selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan kerendahan hati serta tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024**" tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 21 Juni 2025

Deklarator



Anief Khaefatun Nisa

NIM 2105026072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi memiliki kedudukan yang signifikan dalam penulisan skripsi, mengingat sering ditemui berbagai istilah dalam bahasa Arab, baik berupa nama individu, judul literatur, nama lembaga, maupun istilah lainnya yang semula ditulis menggunakan huruf Arab dan perlu dialihaksarakan ke dalam huruf Latin. Untuk menjaga konsistensi dan ketepatan dalam penulisan, perlu ditetapkan suatu pedoman transliterasi yang akan dijadikan acuan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin

ي...أ	Fathah dan ya	Ai
و...أ	Fathah dan wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
...ـَا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā
...ى	Kasrah dan ya	Ī
...ـُو	Dammah dan Wau	Ū

E. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ً)

F. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al* misalnya الرَّجُلُ= Arrojulu. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbuthah

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan *"h"* misalnya طَلْحَةْ= *talhah*, رَوْضَةُ الأَطْفَال= *raudhah al-athfal*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang bersifat struktural dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek ekonomi maupun demografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Rasio Ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), mencakup 35 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah selama lima tahun. Proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak E-Views versi 12. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, variabel TPT tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, Rasio Ketergantungan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan. Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,989517 menunjukkan bahwa sebesar 98% variasi yang terjadi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang diteliti, yaitu UMK, TPT, dan Rasio Ketergantungan. Adapun sisanya, sekitar 1,05%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model analisis.

***Kata Kunci**: Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Ketergantungan.*

ABSTARCT

Poverty is a structural problem that arises from a combination of economic and demographic factors. This study seeks to investigate the influence of the Regency/City Minimum Wage (UMK), the Open Unemployment Rate (TPT), and the Dependency Ratio on poverty levels in Central Java Province during the period 2020–2024. The research adopts a quantitative method using panel data regression analysis. The study utilizes secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS), covering 35 regencies and cities in Central Java over a span of five years. Data analysis was performed using E-Views 12 software. The findings indicate that the UMK variable has a significant negative effect on poverty, meaning that higher minimum wages are associated with lower poverty rates. In contrast, the TPT variable does not show a statistically significant impact on poverty. Meanwhile, the Dependency Ratio has a significant positive effect, suggesting that a higher proportion of dependents correlates with increased poverty levels. The coefficient of determination (R^2) value of 0.989517 shows that 98% of the variation in poverty can be explained by the three independent variables UMK, TPT, and the Dependency Ratio. The remaining 1.05% is attributed to other factors not included in this model.

Keywords: *Poverty, Regency/City Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Dependency Ratio.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024"** dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan secara maksimal tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ferry Khusnul Mubarok, M.A., selaku Kepala Jurusan Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arief Darmawan, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan nasihat, masukan dan dorongan yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Singgih Muheramtohadi, M.E.I., selaku dosen wali, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani proses studi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membagikan ilmu, wawasan, serta inspirasi yang sangat berharga selama masa perkuliahan penulis.
7. Orang tua tercinta yang telah mendidik dengan ketulusan. Terima kasih untuk rapalan doa yang tak henti dilangitkan dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT dan peran semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, maupun

pembaca. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin Yarobbal 'alamiin.*

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis,

Anief Khaefatun Nisa

2105026072

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **1**
LEMBAR PENEGSAHAN **2**
MOTTO **3**
PERSEMBAHAN **4**
DEKLARASI **5**
PEDOMAN TRANSLITERASI **6**
ABSTRAK **8**
ABSTARCT **9**
KATA PENGANTAR **10**
DAFTAR ISI **12**
DAFTAR TABEL **14**
DAFTAR GAMBAR **15**
DAFTAR LAMPIRAN **16**
BAB I PENDAHULUAN **17**
1.1 Latar Belakang 17
1.1 Rumusan Masalah 24
1.2 Tujuan Penelitian 24
1.3 Manfaat Penelitian 24
1.4 Sistematika Penulisan 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **26**
2.1 Kerangka Teori 26
2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 26
2.1.2 Kemiskinan 27
2.1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota 33
2.1.4 Pengangguran 35
2.1.5 Rasio Ketergantungan 37
2.2 Penelitian Terdahulu 40
2.3 Hipotesis Penelitian 48
2.4 Kerangka Berpikir 50
BAB III METODE PENELITIAN **51**
3.1 Jenis dan Sumber Data 51
3.2 Populasi dan Sampel 51
3.3 Teknik Pengumpulan Data 51

3.4 Variabel Penelitian 52
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 52
3.6 Teknik Analisis Data 53
3.6.1 Analisis Regresi Data Panel 53
3.6.2 Estimasi Regresi Data Panel 54
3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 55
3.6.4 Uji Asumsi Klasik 55
3.6.5 Uji Hipotesis 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Gambaran Objek Penelitian 58
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 58
4.1.2 Gambaran Umum Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 58
4.1.3 Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 60
4.1.4 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah 61
4.1.5 Gambaran Umum Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah 62
4.2 Analisis Deskriptif 63
4.3 Analisis Data 64
4.3.1 Model Estimasi Data Panel 64
4.3.2 Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel 66
4.3.3 Hasil Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel 67
4.3.4 Uji Asumsi Klasik 68
4.3.5 Uji Hipotesis 70
4.4 Pembahasan 72
4.4.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan 72
4.4.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan 74
4.4.3 Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan 76
BAB V PENUTUP 78
5.1 Kesimpulan 78
5.2 Keterbatasan Penelitian 78
5.3 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 19
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 40
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 52
Tabel 4.1 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 59
Tabel 4.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 60
Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 61
Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 62
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif 63
Tabel 4.6 Hasil UJji Common Effect Model (CEM) 64
Tabel 4.7 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM) 65
Tabel 4.8 Hasil Uji Random Effect Model (REM) 65
Tabel 4.9 Uji Chow 66
Tabel 4.10 Uji Hausman 67
Tabel 4.11 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel 67
Tabel 4.12 Uji Normallitas 69
Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas 69
Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas 70
Tabel 4.15 Uji t 70
Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi (R2) 72
Tabel 4.17 Perbandingan Rata-Rata Rasio Ketregantungan dengan Rata-Rata Kemiskinan Tahun 2020-2025 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia 18
Gambar 1. 2 Perbandingan TPT dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 20
Gambar 1. 3 Perbandingan Rasio Ketergantungan dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 22
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan 27
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 50
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data 86
Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif 90
Lampiran 3 Hasil Common Effect Model 90
Lampiran 4 Hasil Fixed Effect Model 91
Lampiran 5 Hasil Random Effect Model 91
Lampiran 6 Hasil Uji Chow 92
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman 92
Lampiran 8 Hasil Estimasi Pemilihan Model 92
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas 93
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas 93
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas 93
Lampiran 12 Hasil Uji t 93
Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Salah satu fokus utama dari agenda pembangunan tersebut adalah pengurangan angka kemiskinan. Isu terkait penanggulangan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam kerangka SDGs, pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mengakhiri seluruh bentuk kemiskinan dalam jangka waktu 15 tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses terhadap layanan dasar dan hidup dalam kondisi yang layak, didukung oleh berbagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi kelompok miskin.[1]

Dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan keadaan yang berpotensi mengguncang ketenangan batin dan dapat mengikis kekuatan iman, karena kerap dikaitkan dengan kekufuran. Individu yang berada dalam tekanan ekonomi tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga mengalami hambatan dalam menjalankan ibadah secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, ajaran Islam menekankan pentingnya membentuk generasi yang tangguh, baik secara keimanan, kecerdasan, maupun kemampuan ekonomi. Nilai ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 9, yang memberikan peringatan agar tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: "*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*"[2]

Dalam pelaksanaan kebijakan pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui metode

[1] BPS, *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*, *Katalog BPS*, 2016, https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3 BPS Potret Awal TPB di Indonesia.pdf.

[2] "QS. An-Nisa Ayat 9," n.d., https://quran.kemenag.go.id/.

ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan pangan maupun non-pangan, yang dinilai berdasarkan besarnya pengeluaran. Seseorang dinyatakan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan berada di bawah batas garis kemiskinan. Besaran garis kemiskinan ini bervariasi tergantung waktu dan daerah, disesuaikan dengan harga barang kebutuhan dasar dan hasil pengumpulan data lapangan. Sebagai ilustrasi, pada bulan September 2024, BPS mencatat garis kemiskinan nasional sebesar Rp566.655 per kapita per bulan, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah angkanya berada pada Rp508.298 per kapita per bulan.[3]

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di wilayah ini menunjukkan pola perubahan yang tidak stabil. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait kondisi tersebut, berikut ditampilkan data persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024.

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia



Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa tren kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2020 hingga 2024 mengalami perubahan yang naik-turun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mencapai 11,41% dan meningkat menjadi 11,79% pada tahun 2021. Kenaikan ini terjadi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan

[3] "Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024" (Jakarta, 2025), https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1IzI=/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html.

terganggunya kegiatan ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran, serta penurunan pendapatan masyarakat, yang secara keseluruhan berdampak pada naiknya angka kemiskinan.[4] Namun sejak tahun 2022 hingga 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami tren penurunan, yaitu menjadi 10,93% dan terus berkurang hingga mencapai 10,47%. Pada tahun 2024. Meskipun begitu, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Salah satu kebijakan yang dianggap dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan adalah penetapan batas upah minimum oleh pemerintah. Upah yang terlalu rendah menjadi salah satu pemicu timbulnya kondisi kemiskinan. Penghasilan yang berada di bawah standar minimum akan menyulitkan individu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan ini disusun sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat tetap memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak.[5]

Tabel 1. 1 Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah

Tahun	UMP	Perkembangan
2020	Rp 1.742.015	8,51%
2021	Rp 1.798.979	3,27%
2022	Rp 1.812.935	0,78%
2023	Rp 1.958.169	8,01%
2024	Rp 2.036.947	4,02%

Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa upah minimum di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) tercatat sebesar Rp2.036.947, mengalami kenaikan sebesar 4,02% atau setara Rp78.778 dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.958.169. Peningkatan ini turut mempengaruhi bertambahnya besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh daerah Jawa Tengah. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi bagi tenaga kerja dari tahun ke tahun. Namun, meskipun kenaikan upah minimum terjadi setiap tahun selama periode 2020–2024, hal tersebut tidak selalu disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Sebagai contoh, pada tahun 2021, meski terjadi peningkatan UMP, persentase kemiskinan justru meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori yang diharapkan dan realitas yang terjadi di lapangan.

[4] Natalia Desripa et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Analisis Kritis," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024), h.8.

[5] Ali Mauludi AC, Fadllan, dan Fitri Nur Rahmawati, "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2023), h.68.

Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan tidak seragam di setiap daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Yulita bersama tim.[6] Menyimpulkan bahwa upah minimum memberikan dampak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, studi dari I. T. Utami dan M. Rofiuddin[7] mengungkapkan bahwa di salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebijakan upah minimum tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan temuan ini menandakan bahwa efek dari upah minimum terhadap kemiskinan dapat berbeda tergantung pada karakteristik wilayahnya.

Selain kebijakan upah minimum, persoalan pengangguran juga menjadi faktor dominan yang mendorong naiknya tingkat kemiskinan. Situasi kemiskinan dapat semakin parah apabila peningkatan jumlah penganggur tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.[8] Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang berusaha memperoleh pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha baru, atau telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan tidak lagi mencari pekerjaan. Sementara itu, pengangguran terbuka merujuk pada kelompok yang belum bekerja dan bersiap untuk memulai kegiatan ekonomi, termasuk mereka yang berhenti mencari kerja karena merasa sulit mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya. Peningkatan angka pengangguran berdampak pada penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung, maka kemungkinan peningkatan angka kemiskinan di suatu daerah akan semakin besar.[9]

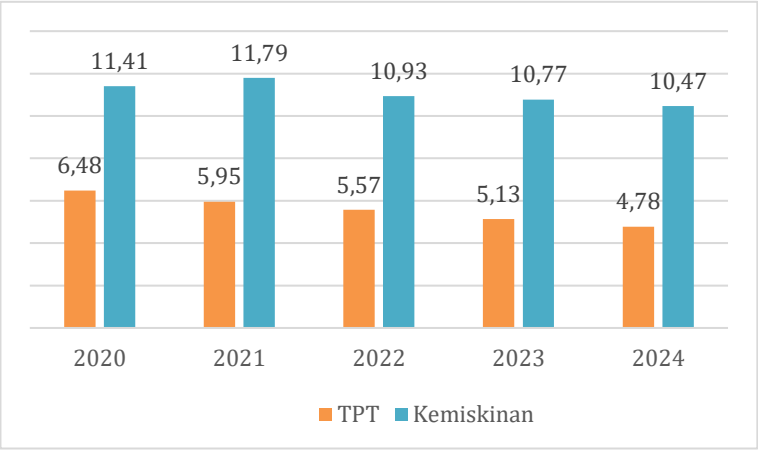
[6] Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, dan Steeva Y.L. Tumangkeng, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 88–98.

[7] Indah Tri Utami dan Mohammad Rofiuddin, "Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim," *Journal of Economics Research and Policy Studies* 2, no. 3 (2022): 145–60, https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.463.

[8] Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah Muchtolifah, dan Sishadiyati Sishadiyati, "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Economic Education Journal* 3, no. 2 (2021), h.136, https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058.

[9] Sekar Ayu Permatasari, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2023" 17, no. 2 (2024), h.2096.

Gambar 1. 2 Perbandingan TPT dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan penurunan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 6,48% dan terus berkurang hingga menyentuh angka 4,78% pada tahun 2024. Secara teoritis, semakin rendah tingkat pengangguran, seharusnya semakin kecil pula jumlah penduduk miskin, sebab semakin banyak penduduk yang bekerja akan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu mencerminkan hubungan yang demikian. Meski TPT mengalami penurunan, hal itu tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, TPT tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, tetapi persentase penduduk miskin justru meningkat. Keadaan ini memperlihatkan bahwa turunnya tingkat pengangguran tidak selalu menjadi indikator langsung dari perbaikan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh I D.G.M. Radityana dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa di Provinsi Bali, pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, dalam riset yang dilakukan oleh Reki Ardian bersama timnya,[10] mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

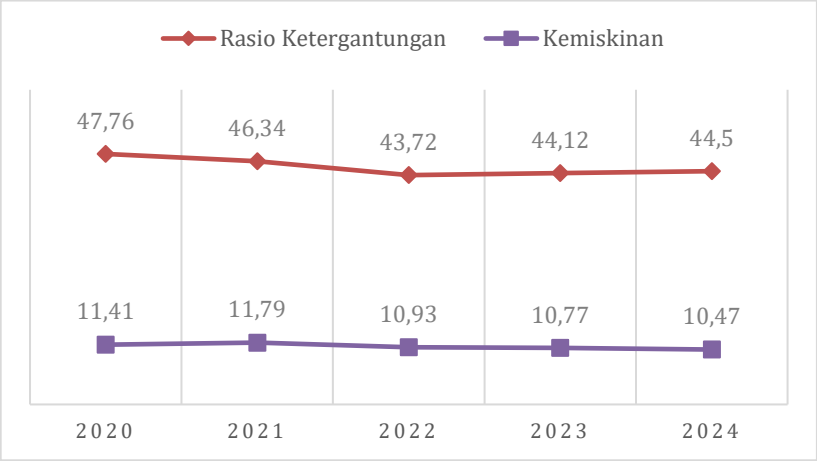
Selain faktor upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka, rasio ketergantungan juga menjadi aspek penting dalam memahami dinamika kemiskinan. Rasio ini menunjukkan

[10] Reki Ardian, Yulmardi Yulmardi, dan Adi Bhakti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi," *Jurnal Ekonomi Aktual* 1, no. 1 (2021): 23–34, https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3.

perbandingan antara jumlah penduduk yang berada di luar usia produktif dengan mereka yang berada dalam usia produktif atau angkatan kerja.[11] Kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat menyebabkan perubahan struktur demografis, khususnya meningkatnya proporsi penduduk usia non-produktif.[12] Kondisi ini berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan, yang berarti semakin besar pula tanggungan ekonomi terhadap penduduk usia kerja. Ketika beban ini semakin berat, laju pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan akhirnya memicu naiknya angka kemiskinan.

Gambar 1. 3

Perbandingan Rasio Ketergantungan dan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

Mengacu pada Gambar 1.3, rasio ketergantungan di Jawa Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 47,76%, kemudian mengalami penurunan menjadi 46,34% pada 2021 dan terus menurun hingga 43,72% di tahun 2022. Namun, tren tersebut berubah pada 2023 dengan adanya peningkatan sebesar 0,9 poin menjadi 44,12%. Kenaikan ini berkorelasi dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Pada tahun 2022, lansia berjumlah 4,86 juta jiwa (13,07% dari total penduduk), dan meningkat menjadi 5,07 juta jiwa atau 13,50% pada tahun 2023.[13] Bertambahnya jumlah lansia turut menambah tekanan terhadap kelompok usia kerja, sebab mereka umumnya sudah tidak aktif

[11] Kristina Luruk, "Determinan Faktor Sosial Dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia Social And Economic Factors Determinants On Population Poverty In Indonesia," *EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 4 (2021), h.14.

[12] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 5 ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h.339.

[13] BPS Provinsi Jawa Tengah, *Profil Lansia Provinsi Jawa Tengah 2023*, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, vol. 14, 2024.

dalam kegiatan ekonomi dan membutuhkan bantuan dari usia produktif. Pada tahun 2024, nilai rasio ketergantungan mencapai 44,5%, yang artinya setiap 100 orang yang tergolong usia produktif menanggung sekitar 45 orang dari kelompok usia tidak produktif.

Penurunan rasio ketergantungan tidak selalu diikuti oleh perbaikan dalam angka kemiskinan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan rasio ketergantungan, jumlah penduduk miskin justru meningkat. Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024, ketika rasio ketergantungan naik, angka kemiskinan menunjukkan penurunan. Ini mencerminkan bahwa keterkaitan antara kedua indikator tersebut tidak selalu berjalan secara langsung. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara rasio ketergantungan dan kemiskinan, dengan hasil yang tidak seragam. Di antaranya, penelitian oleh Nurhafizah dan Ade Yunita[14] yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa tingginya rasio ketergantungan dapat memicu peningkatan kemiskinan. Sementara itu, hasil berbeda ditemukan dalam studi oleh Adelia Nadiva I. bersama Niniek Imaningsih,[15] yang menyatakan bahwa di Kabupaten Tambrauw, rasio ketergantungan tidak berpengaruh secara signifikan dan cenderung berdampak negatif terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena yang terjadi serta celah penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa isu kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi permasalahan yang patut mendapat perhatian lanjutan. Beberapa faktor ekonomi dan demografis, seperti besaran upah minimum di tingkat kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan, diduga turut berperan dalam memengaruhi kemiskinan. Meskipun demikian, hubungan antar variabel tersebut masih belum sepenuhnya jelas dan perlu dianalisis lebih lanjut. Di sisi lain, fluktuasi kondisi perekonomian selama periode 2020 hingga 2024, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 serta fase pemulihannya, juga memberi pengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengangkat tema penelitian dengan judul sebagai berikut:

"Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Ketergantungan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024".

[14] Nurhafizah dan Ade Yunita Mafruhat, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 109–17, https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402.

[15] Adelia Nadiva Iswahyudi dan Niniek Imaningsih, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Rasio Ketergantungan , dan Indeks Kemahalan Konstruksi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw," *Jambura Economic Education Journal* 7, no. 1 (2025): 210–24.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024?
3. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024.
3. Mengetahui pengaruh rasio ketergantungan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian terkait kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman teoritis mengenai pengaruh upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan serta sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan yang efektif guna menanggulangi kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab utama, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menyajikan teori yang relevan dengan topik penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, penyusunan kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas secara rinci metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan sumber data, penetapan populasi dan sampel, definisi operasional masing-masing variabel, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penyajian data temuan dari hasil analisis, serta penjelasan dan interpretasi terhadap hasil tersebut dengan mengaitkannya pada teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta memuat saran-saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

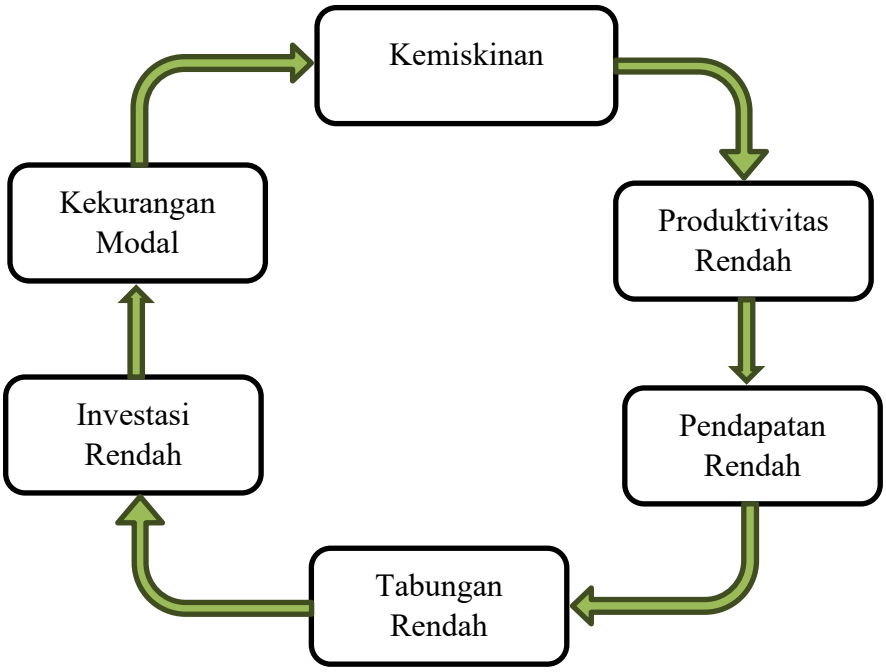
Gagasan mengenai *lingkaran kemiskinan* diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Dalam pandangannya, kemiskinan di suatu negara bersifat terus-menerus karena negara tersebut terjebak dalam kondisi yang menyebabkan kemiskinan itu berulang. Pernyataan Nurkse yang terkenal, "a poor country is poor because it is poor", mengandung makna bahwa kemiskinan cenderung melanggengkan dirinya sendiri. Konsep ini menjelaskan bahwa berbagai elemen ekonomi dan sosial saling berinteraksi dalam cara yang memperkuat kemiskinan, sehingga negara yang mengalami situasi ini kesulitan keluar dari stagnasi dan mencapai kemajuan pembangunan.[16]

Ragnar Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bersumber dari saling keterkaitan berbagai faktor yang memperkuat satu sama lain secara terus-menerus. Keterbatasan dalam perkembangan ekonomi, ketidakefisienan pasar, serta minimnya akses terhadap sumber daya modal, menyebabkan aktivitas produksi berjalan secara kurang optimal. Kondisi tersebut menghasilkan tingkat produktivitas yang rendah, sehingga pendapatan masyarakat menjadi terbatas. Pendapatan yang rendah ini menyebabkan lemahnya kemampuan individu untuk menabung atau menanamkan modal, yang kemudian memperdalam kondisi ketertinggalan ekonomi. Situasi ini membentuk suatu pola berulang yang dikenal sebagai siklus kemiskinan.[17] Tanpa adanya tindakan atau kebijakan intervensi yang tepat sasaran, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap terperangkap dalam kondisi tersebut. Maka dari itu, strategi pengurangan kemiskinan perlu diarahkan untuk menghentikan proses berulang yang menjadi akar dari persoalan ini.

[16] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016),* h. 111.

[17] Mudjarad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), h.107.

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber: Mudjarad Kuncoro (2000)

Pandangan Ragnar Nurkse mengenai lingkaran kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk memahami hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Rendahnya upah minimum di tingkat kabupaten atau kota mengakibatkan terbatasnya pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan mereka untuk menabung atau melakukan investasi menjadi sangat terbatas. Selain itu, tingginya angka pengangguran terbuka mencerminkan rendahnya serapan tenaga kerja oleh pasar, yang kemudian berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas serta penghasilan masyarakat. Di sisi lain, tingginya rasio ketergantungan memperbesar beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia kerja, sehingga berpotensi menekan kapasitas mereka dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Ketiga aspek tersebut, jika berlangsung secara simultan, dapat memperkuat rantai permasalahan kemiskinan yang dijelaskan dalam kerangka berpikir Nurkse.

2.1.2 Kemiskinan

A. Definisi dan Ciri-Ciri Kemiskinan

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan keadaan ketika seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan pokok, baik yang berkaitan dengan konsumsi makanan maupun non-makanan, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah pengeluaran. Dengan kata

lain, seseorang dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya dalam satu bulan berada di bawah ambang batas garis kemiskinan yang telah ditetapkan secara resmi.[18]

Kemiskinan merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks perumusan kebijakan, kondisi miskin tidak semata-mata diartikan sebagai kekurangan materi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam penguasaan aset, posisi yang lemah dalam tatanan sosial dan politik, serta minimnya kemampuan dalam bentuk keterampilan maupun pengetahuan. Selain aspek tersebut, kemiskinan juga berkaitan dengan keterisolasian individu dari jaringan sosial, kesulitan mengakses layanan keuangan, dan terbatasnya arus informasi yang dapat mereka jangkau. Semua dimensi ini tercermin dalam kondisi nyata seperti kurangnya asupan gizi, kesulitan memperoleh air bersih, lingkungan tempat tinggal yang tidak layak huni, terbatasnya layanan kesehatan, serta rendahnya capaian pendidikan formal.[19]

Menurut pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin atau belum mencapai taraf kesejahteraan. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan dalam menilai kondisi sosial ekonomi keluarga secara lebih menyeluruh:[20]

1) Luas lantai hunian kurang dari 8 meter persegi per orang.
2) Material lantai hunian terbuat dari tanah, bambu, atau kayu dengan kualitas rendah.
3) Dinding hunian terbuat dari bahan berkualitas rendah seperti bambu, daun rumbia, kayu murahan atau tembok yang belum diplester.
4) Tidak memiliki akses terhadap fasilitas baung air besar sendiri atau menggunakannya secara bersama dengan rumah tangga lain.
5) Tidak menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangan.
6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, sungai atau air hujan.
7) Menggunakan bahan bakar kayu, arang atau minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
8) Mengonsumsi daging, ayam, susu hanya satu kali dalam seminggu.
9) Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.

[18] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024" (Jakarta, 2024).
[19] Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, h. 301*.
[20] Muhamad Fahrul Mustofa dan Tris Utomo, "Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili," *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 5 (2023), h.11.

10) Hanya mampu mengkonsumsi makanan sebanyak satu hingga dua kali dalam sehari.
11) Tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pelayanan di puskesmas atau poliklinik.
12) Kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau petani yang lahannya kurang dari 0,5 hektar serta berpenghasilan di bawah Rp600.000 per bulan.
13) Kepala rumah tangga tidak pernah sekolah/ tidak tamat SD atau hanya lulus SD.
14) Tidak memiliki simpanan atau barang berharga yang dapat dijual senilai minimal Rp500.000, seperti motor, emas, ternak, atau barang sejenis.

B. Penyebab Kemiskinan

Sharp, et al, mengemukakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh beberapa faktor utama yaitu sebagai berikut:[21]

1) Kemiskinan ada karena distribusi kepemilikan sumber daya yang tidak merata di masyarakat. Penduduk miskin umumnya hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah, sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai.
2) Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah menunjukkan produktivitasnya juga rendah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan.
3) Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap modal dan peluang ekonomi.

C. Jenis-Jenis Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua antara lain:[22]

1) Kemiskinan absolut, yaitu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk hidup layak dan bekerja.
2) Kemiskinan relatif, ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini disebabkan oleh proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dikategorikan ke dalam tiga jenis, antara lain:[23]

---

[21] Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), h. 107*.
[22] Mudjarad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h.57.
[23] Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2004).

1) Kemiskinan Alami

Merupakan kondisi miskin yang dialami sejak awal, biasanya terjadi di wilayah terpencil atau terisolasi yang jauh dari akses terhadap sumber daya dan infrastruktur. Akibatnya, perkembangan teknologi berjalan sangat lambat, sehingga masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Contohnya yaitu masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari pusat pemukiman.

2) Kemiskinan kultural

Jenis kemiskinan ini disebabkan oleh budaya atau kebiasaan yang menghambat perubahan dan kemajuan. Pola pikir yang pasrah terhadap keadaan atau enggan berusaha menjadi salah satu faktor yang membuat kemiskinan terus berlangsung.

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini muncul akibat ketimpangan dalam sistem sosial atau kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan modal membuat masyarakat tidak mampu keluar dari perangkap kemiskinan.

D. Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan merupakan hasil penjumlahan antara garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).[24]

a. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk kebutuhan makanan yang mencukupi 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan ini terdiri dari 52 jenis barang, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, minyak dan lemak, dan lainnya.

b. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan terdiri dari 51 jenis barang di wilayah perkotaan dan 47 jenis barang di pedesaan.

Rumus untuk menghitung garis kemiskinan yaitu sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

[24] Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

2. Persentase Penduduk Miskin

Head Cound Indeks (HCI P0), yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rumus perhitungannya yaitu:[25]

$$P_0 = \frac{q}{N} \times 100\%$$

Di mana:

q = Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

N = Jumlah penduduk

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks-P_1*)

Indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing individu miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk jauh di bawah kemiskinan.[26]

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severty Indeks-P2*)

Indeks ini memberikan gambaran tentang sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

E. Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ajaran fikih, istilah *miskin* dan *fakir* memiliki perbedaan meskipun keduanya tergolong dalam kelompok yang membutuhkan (*duafa'*). *Fakir* digambarkan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan, atau jika pun memiliki, nilainya sangat jauh dari mencukupi. Sebagai contoh, seseorang hanya memiliki dua dinar, sementara kebutuhannya mencapai sepuluh dinar. Sementara itu, *miskin* merujuk pada individu yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun pendapatannya belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Misalnya, seseorang memperoleh tujuh dinar, padahal kebutuhan hidupnya sebesar sepuluh dinar.[27]

Dalam ajaran Al-Qur'an, upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui sejumlah prinsip yang bertujuan untuk memperkuat posisi kelompok fakir dan miskin. Prinsip-prinsip ini menitikberatkan pada nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial, yang berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil menurut pandangan Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain mencakup:[28]

---

[25] *Ibid.*, h.237.

[26] *Ibid.*, h.237.

[27] Nur Fatoni, "DPU (DOMPET PEDULI UMAT) DAARUT TAUHID Peran Misykat Daarut Tauhid dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V (2014), h. 77.

[28] Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015), h. 73, https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787.

1) Prinsip ta'awun, yaitu prinsip tolong menolong dan kolaborasi antara sejumlah pihak seperti pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam, serta kelompok masyarakat secara luas.
2) Prinsip syura, yaitu prinsip musyawarah antara pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin, yang bertujuan untuk menciptakan program terhadap kemiskinan dengan cara mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, penanggulangan kemiskinan berpijak pada konsep maqashid syariah yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam mengelola bumi. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya yang bijak dan diarahkan untuk kemanfaatan umat. Prinsip ini mendorong distribusi kekayaan yang proporsional, tidak menumpuk pada kelompok tertentu, serta mendukung pemenuhan hak kaum yang membutuhkan melalui berbagai instrumen sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Ajaran ini diperkuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang menegaskan pentingnya penyucian harta melalui zakat sebagai sarana pembersihan jiwa dan peningkatan solidaritas sosial:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ۗ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. At-Taubah [9]:103[29]

Pemanfaatan dana ZISWAF dapat diterapkan sebagai berikut:[30]

1) Aktivitas produksi. Pemanfaatan dana ZISWAF dapat menciptakan permintaan baru yang berdampak pada meningkatnya produksi agregat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.
2) Investasi. Islam sangat mendorong kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai sarana optimalisasi kekayaan yang produktif dan berkelanjutan.
3) Penciptaan lapangan kerja. Dana ZISWAF dapat dialokasikan sebagai modal usaha bagi kelompok penerima manfaat (mustahik), sehingga membuka peluang kerja dan peningkatan taraf hidup mereka secara mandiri.

[29] "QS. At-Taubah Ayat 103," https://quran.kemenag.go.id/, n.d.

[30] A. Jajang Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 208. https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81.

4) Pertumbuhan ekonomi. Penggunaan ZISWAF sebagai modal usaha mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, konsumsi, dan produktivitas. Efek berganda ini akan memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan sosial dan spiritual.

2.1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota

A. Definisi dan Tujuan Penetapan Upah Minimum

Upah minimum merupakan salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dirancang untuk memastikan pekerja memperoleh imbalan yang layak. Salah satu bentuknya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yakni batas minimum upah bulanan yang diberlakukan di suatu wilayah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan gubernur. UMK biasanya mencakup bagian utama dari penghasilan dan tunjangan tetap, serta ditentukan berdasarkan pertimbangan seperti tingkat kebutuhan hidup yang wajar, inflasi, serta perkembangan ekonomi daerah setempat. Dalam regulasi yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai pengupahan, UMK wajib lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan penetapannya dilakukan setelah UMP diumumkan. Proses ini juga mempertimbangkan usulan dari bupati atau walikota, serta saran dari Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.[31]

Pemberlakuan upah minimum memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, termasuk aspek kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Pendapatan yang lebih tinggi dari upah minimum memungkinkan pekerja untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, memperbaiki kondisi kesehatan, serta menjaga kualitas hidup yang layak. Dengan begitu, peningkatan penghasilan dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah keterpurukan dalam kondisi kemiskinan.[32]

Upah minimum mengalami penyesuaian setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi di masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator karena mencerminkan seberapa aktif kondisi perekonomian suatu daerah, apakah menunjukkan peningkatan atau justru perlambatan. Sementara itu, tingkat inflasi digunakan sebagai acuan karena mencerminkan perubahan harga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi masyarakat. Apabila inflasi berada pada level yang tinggi, maka hal tersebut dapat menyulitkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka.

---

[31] Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," *Jakarta* 53, no. 9 (2021): 6.

[32] Joko Susanto dan Windyastuti Windyastuti, "Increasing the Minimum Wage As a Means of Poverty Alleviation," *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 7, no. 2 (2023): 72–87, https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.400.

B. Metode Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Indonesia didasarkan pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mengenai sistem pengupahan. Dalam menentukan besaran UMK, digunakan beberapa variabel penting seperti inflasi, perkembangan ekonomi daerah, serta nilai indeks tertentu yang dijadikan referensi. Komponen-komponen tersebut kemudian dimasukkan dalam formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah:[33]

$$UMK_t = UMK_{t-1} + (\text{Penyesuaian Upah})$$

Di mana:

$$\text{Penyesuaian Upah} = UMK_{t-1} + (\text{Inflasi} + \text{Pertumbuhan ekonomi} \times \alpha)$$

Keterangan:

- UMK_t = Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun berjalan
- UMK_{t-1} = Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun sebelumnya
- Inflasi = Tingkat inflasi provinsi dalam persen (%)
- Pertumbuhan Ekonomi = Pertumbuhan ekonomi provinsi dalam persen (%)
- α = Faktor penyesuaian yang ditentukan dalam rentang 0,10-0,30

C. Upah Minimum Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, upah dipahami sebagai kompensasi yang diberikan kepada individu atas kontribusi tenaga atau jasa yang telah disalurkan. Prinsip utama dalam penetapan upah menurut ajaran Islam adalah keadilan dan keterbukaan, serta harus mencerminkan nilai kerja yang telah diselesaikan oleh pekerja.[34]

Landasan hukum mengenai upah tertera dalam salah satu Hadis Nabi SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

أَعْطُو ا الأ جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه

Artinya: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."

Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap individu yang memberikan pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah tanpa menunda. Pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan atas kerja yang

[33] Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," *Bpk Ri*, no. 1873884 (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Details/270269/pp-no-51-tahun-2023.

[34] Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analsisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1–8.

dilakukan, tetapi juga sebagai bagian dari hak dasar manusia. Dalam penerapannya, pemberian upah harus mengacu pada tiga asas penting, yaitu prinsip keadilan, kepantasan, serta kebijaksanaan.[35]

2.1.4 Pengangguran

A. Definisi dan Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu indikator ketidakstabilan ekonomi, yang ditandai dengan tidak terserapnya sebagian angkatan kerja ke dalam dunia kerja. Dalam salah satu definisi, pengangguran digambarkan sebagai keadaan di mana seseorang termasuk dalam kelompok angkatan kerja, namun tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pengangguran terjadi apabila individu yang tergolong angkatan kerja sedang berusaha memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.[36] Oleh karena itu, pengangguran dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang berada dalam angkatan kerja namun belum bekerja, baik karena tidak sedang mencari kerja maupun karena belum memperoleh pekerjaan meskipun telah berupaya secara aktif.

Edgar O. Edwars mengklasifikasikan pengangguran ke dalam lima bentuk yaitu:[37]

1) Pengangguran terbuka, baik yang sukarela (yaitu mereka yang secara sadar memilih untuk tidak mengambil pekerjaan tertentu yang sebenarnya tersedia, biasanya karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan preferensi, keterampilan, atau tidak didukung oleh fasilitas yang memadai) dan yang tidak sukarela (yaitu mereka yang ingin bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2) Semi pengangguran, yaitu orang yang hanya bekerja dalam waktu yang terbatas (kurang dari 35 jam).
3) Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu seseorang yang sebenarnya bekerja tetapi berdasarkan waktu tertentu, yang meliputi:
    a. Semi pengangguran tersamar, yaitu mereka yang bekerja penuh waktu, seperti petani, namun sebenarnya pekerjaan tersebut tidak membutuhkan waktu kerja secara penuh.
    b. Semi pengangguran tersembunyi, yaitu seseorang yang menjalani aktivitas non-kerja sebagai alternatif akibat terbatasnya peluang kerja yang sesuai dengan pendidikan atau norma sosial, terutama pada perempuan.

---

[35] Listari dan Asmuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Kerja Borongan Pada Bangunan Rumah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2024), h.49.

[36] Cut Nova Rianda, "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 1 (2020), h.19.

[37] Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, 3 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.307.

c. Pensiun dini, yaitu kondisi ketika seseorang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal.

4) Penyandang hambatan jasmani, yaitu mereka yang bekerja penuh waktu tetapi memiliki produktivitas rendah akibat keterbatasan fisik serta tidak adanya jaminan kesehatan dan akses makanan bergizi.
5) Tidak produktif, yaitu mereka yang sebenarnya mampu bekerja seacara produktif, namun terkendala oleh sumber daya tambahan yang terbatas.

B. Konsep dan Pengukuran Pengangguran Terbuka

Edwards dalam Arsyad mengemukakan bahwa pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Keadaan ini dapat bersifat sukarela, yakni ketika individu sebenarnya mampu mendapatkan pekerjaan tetap, namun memilih untuk tidak bekerja karena alasan tertentu, misalnya sudah merasa tercukupi secara ekonomi. Di samping itu, pengangguran terbuka juga mencakup individu yang mengalami kondisi tidak bekerja karena keadaan yang tidak dapat dihindari, yaitu mereka yang bersedia bekerja secara penuh tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.[38]

Pengangguran terbuka terjadi ketika pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Ketimpangan ini menyebabkan banyaknya individu yang tidak dapat terserap dalam dunia kerja, sehingga angka pengangguran meningkat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Lonjakan tingkat pengangguran juga dapat membawa dampak buruk, seperti meningkatnya kejahatan, terganggunya ketertiban sosial dan politik, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.[39]

Untuk menentukan besaran persentase tingkat pengangguran terbuka menggunakan rumus sebagai berikut:[40]

$$TPT = \frac{Jumlah\ pengangguran}{Angkatan\ Kerja}\ X\ 100\%$$

Dimana:

[38] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi 1*, Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 260.

[39] Vidya Anggraini et al., "Determinants of Poverty Levels in the Northern Coast of East Java," *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 8, no. 1 (2023), h. 107.

[40] Wahyu Indri Astuti, Vita Ratnasari, dan Wahyu Wibowo, "Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017), h. 152.

- Jumlah Pengangguran adalah orang-orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, termasuk yang bersiap memulai usaha atau yang tidak mencari kerja karena merasa tidak ada kesempatan.
- Angkatan kerja adalah seluruh penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang sedang bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan.

C. Pengangguran Terbuka Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, persoalan pengangguran tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan juga mencakup aspek etika, sosial, dan nilai spiritual. Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam pemerataan kekayaan dan menjunjung tinggi pentingnya kesejahteraan kolektif. Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pengangguran harus ditangani melalui pendekatan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan sosial, keseimbangan dalam kehidupan, serta kepedulian terhadap sesama.[41]

Islam menganjurkan umatnya untuk aktif bekerja dan memproduksi, karena Allah SWT akan menjanjikan ganjaran yang sepadan sesuai usaha dan amal yang dilakukan. Perintah tersebut terdapat dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka Kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka lakukan. An-Nahl [16]:97[42]

Ayat ini menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang perlu berusaha secara sungguh-sungguh. Allah akan memberikan ganjaran yang mulia kepada siapa saja yang mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh agama.[43] Karena itu, kerja yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sejalan dengan ajaran Islam menjadi faktor penting dalam meraih keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

2.1.5 Rasio Ketergantungan

A. Definisi dan Dampak Rasio Ketergantungan

[41] Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, dan Apriza Apriza, "Pengangguran dalam Perspektif Islam," *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (2024): 90–100, https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.185.

[42] "QS. An-Nahl Ayat 97," https://quran.kemenag.go.id/, n.d.

[43] Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020, h. 220.

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang menunjukkan seberapa besar perbandingan antara penduduk usia non produktif, yaitu mereka yang berada pada rentang usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas, dengan penduduk yang termasuk usia produktif, yakni 15–64 tahun. Ketika persentase rasio ini meningkat, hal itu menandakan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung lebih banyak beban untuk mencukupi kebutuhan kelompok usia yang belum atau tidak lagi mampu bekerja.[44]

Rasio ketergantungan sering dijadikan sebagai salah satu parameter dalam mengidentifikasi apakah suatu negara tergolong negara berkembang atau negara maju. Jika rasio ini berada pada angka yang tinggi, maka kelompok usia produktif harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, apabila angkanya rendah, hal itu mengindikasikan bahwa tanggungan ekonomi dari kelompok produktif terhadap kelompok yang tidak bekerja relatif lebih kecil.[45]

Menurut Arsyad, apabila rasio ketergantungan berada pada tingkat yang rendah, maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja terhadap kelompok yang belum atau tidak lagi produktif akan lebih ringan.[46] Sebaliknya, jika rasio ini tinggi, maka porsi pengeluaran rumah tangga cenderung lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang berdampak pada berkurangnya kemampuan dalam menabung maupun berinvestasi. Keadaan ini dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi suatu wilayah. Rasio ketergantungan yang tinggi sering dikaitkan dengan meningkatnya pengeluaran untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Sementara itu, penurunan rasio ini membuka peluang terjadinya bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah individu dalam usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok nonproduktif. Jika peluang ini dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja, maka pertumbuhan ekonomi dapat terdorong secara signifikan.[47]

B. Pengukuran Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:[48]

---

[44] Tri Utari, Junaidi Junaidi, dan Hardiani Hardiani, "Pengaruh faktor-faktor kependudukan dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi," *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 8, no. 2 (2019), h. 83.

[45] Girycki Sana Aleffin dan Niniek Imaningsih, "Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024), h. 422.

[46] Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, h. 298*.

[47] Suci Prasasti dan Teguh Erik Prakoso, "Karakter dan Perilaku Milenial: Peluang atau Ancaman Bonus Demografi," *jurnal Consilia* 3, no. 1 (2020): 10–22, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia.

[48] Nurhuda et al., "Pengaruh Tenaga Kerja dan Dependency Ratio terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara," *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 1 (2023): 1–8, www.depkeu.com.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Non\ Produktif}{Jumlah\ Penduduk\ Produktif} \text{ x } 100$$

Kelompok penduduk yang termasuk dalam kategori non-produktif mencakup mereka yang berusia antara 0 hingga 14 tahun, serta yang telah memasuki usia 65 tahun ke atas. Disisi lain, mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan mencerminkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam mendukung kehidupan kelompok non-produktif.

C. Rasio Ketergantungan Perspektif Ekonomi Islam

Tingginya rasio ketergantungan dapat memperberat tanggungan ekonomi yang dipikul oleh kelompok usia kerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang belum produktif maupun yang sudah tidak aktif secara ekonomi, seperti anak-anak dan orang lanjut usia. Situasi ini berpotensi menurunkan daya konsumsi dan kapasitas investasi rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan keluarga, termasuk anak-anak yang belum mandiri, merupakan hal yang sangat penting. Nilai ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisa ayat 9, yang mengingatkan umat untuk menjaga kepentingan generasi penerus dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*[49]

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi kekurangan, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun intelektual. Kondisi ini bisa muncul akibat tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan seperti nutrisi, pendidikan, dan pola pengasuhan yang layak. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi tersebut cenderung menjadi tidak mandiri dan berisiko menjadi beban sosial. Islam memandang pentingnya perencanaan keluarga sebagai upaya untuk memastikan

[49] "QS. An-Nisa Ayat 9."

bahwa generasi selanjutnya mendapat perhatian yang cukup.[50] Melalui pengendalian jumlah anggota keluarga, beban tanggungan dapat diminimalkan, sehingga rasio ketergantungan juga dapat ditekan.

Sebagai bentuk solusi, Islam menawarkan pendekatan penguatan ekonomi melalui pemanfaatan instrumen zakat. Instrumen ini memiliki peran dalam menekan tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat dengan mendorong distribusi zakat dalam bentuk usaha yang bersifat produktif. Zakat yang dikelola secara produktif berfungsi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok usia tidak produktif maupun masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus bergantung pada pihak lain.[51] Penyaluran zakat tidak sebatas untuk keperluan konsumsi, namun dapat dimanfaatkan sebagai permodalan usaha atau pelatihan keahlian. Dengan cara ini, mustahik dapat meningkatkan penghasilan mereka secara bertahap. Melalui sinergi antara tanggung jawab keluarga dan pengelolaan zakat secara efektif, angka ketergantungan dapat ditekan, serta berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
1.	Reza Dwi Darma, Fivien Muslohatinningsih dan Moh. Adenan, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Dependency Ratio terhadap Tingkat	X_1 = Pertumbuhan Ekonomi X_2 = IPM X_3 = Dependency Ratio Y = Tingkat Kemiskinan	Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, IPM berdampak negatif signifikan dan Dependency	Variabel X berupa Pertumbuhan ekonomi dan IPM, periode penelitian yaitu tahun 2018-2022, objek Penelitian.

[50] Syahril Rambe, Erwin Pinayungan Dasopang, dan Imran Ariadin, "Tafsir Ayat Alquran Tentang Tanggung Jawab Orang tua Dalam Mendidik Anak," *Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 2023, h. 215.

[51] Mochlasin Mochlasin, "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 239–58.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	Kemiskinan di Indonesia, 2024.[52]		Ratio berpengaruh positif tidak signifikan.	
2	Fenny Elfride Saigian dan Made Kembar Sri Budhi, Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, 2023.[53]	X_1 = Beban Tanggungan X_2 = Pengangguran X_3 = Pendidikan Y = Kemiskinan	Beban Tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Variabel X berupa pendidikan, objek Penelitian, dan periode penelitian yaitu tahun 2016-2020.
3	Nurlaila Maysaroh Chairunnisa dan Yuha Nadhirah Qintharah, Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat	X_1 = Kesehatan X_2 = Tingkat Pendidikan X_3 = Upah Minimum Y = Kemiskinan	Kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan upah minimum kota/kabupaten tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.	Objek Penelitian, periode penelitian yaitu tahun 2019-2020, variabel X berupa kesehatan dan tingkat pendidikan.

[52] Reza Dwi Darma, Fivien Muslihatinningsih, dan Moh. Adenan, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm Dan Dependency Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekuilibrium* 8, no. 1 (2024): 42, https://doi.org/10.19184/jek.v8i1.46023.

[53] Fenny Elfride Siagian dan Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 11 (2023): 2319, https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i11.p20.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	Tahun 2019-2020, 2022.[54]			
4	Nurhafizah dan Ade Yunita Mafruhat, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2000-2019, 2021.[55]	X_1 = Pertumbuhan Ekonomi X_2 = Dependency Ratio Y = Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi dan Dependency Ratio berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.	Objek Penelitian, variabel X berupa pertumbuhan ekonomi, dan periode penelitian yaitu tahun 2000-2019.
5	Khindya Alifah, Niniek Imaningsih, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum & Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah	X_1 = Tingkat Pendidikan X_2 = Upah Minimum X_3 = Tingkat Pengangguran Terbuka Y = Tingkat Kemiskinan	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat	Objek penelitian, variabel X berupa tingkat pendidikan, penggunaan data yaitu data time series, serta periode penelitian yaitu tahun 2010-2021.

[54] Nurlaila Maysaroh Chairunnisa dan Yuha Nadhirah Qintharah, "Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7, no. 1 (2022): 147–61, https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530.

[55] Nurhafizah dan Mafruhat, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019."

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	Istimewa Yogyakarta, 2023.[56]		kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	
6	Tiara Angel BR Ginting, dkk., *The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua,* 2020.[57]	X_1 = Pendidikan X_2 = Pertumbuhan Ekonomi X_3 = Rasio Ketergantungan Y = Kemiskinan	Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap negatif sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.	Variabel X berupa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, periode penelitian tahun 2014-2018, dan objek Penelitian.
7	Lisda Aisyah, dkk., Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun	X_1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X_2 = Tingkat Pengangguran Terbuka Y = Tingkat Kemiskinan	IPM (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan (Y), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 2012-2022.	Variabel X berupa IPM, objek penelitian, dan periode penelitian tahun 2012-2022.

[56] Khindya Indy Alifah dan Niniek Imaningsih, "Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Tebuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1179.

[57] Tiara Angel BR Ginting et al., "The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 4, no. 6 (2020): 186–95, www.ajhssr.com.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	2012-2022, 2023.[58]			
8	Rizky Yulito Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu dan Steeva Y.L. Tumangkeng, Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, 2019.[59]	X_1 = Upah Minimum X_2 = Investasi Y = Kemiskinan	Upah minimum berdampak signifikan terhadap jumlah kemiskinan, sementara variabel investasi pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.	Variabel X berupa investasi, penggunaan data berupa data time series, periode penelitian tahun 2002-2017, serta objek penelitian.
9	Ibrahim Hasballah, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota , 2021.[60]	X = Tingkat Pengangguran Terbuka Y = Kemiskinan	Pengangguran terbuka mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.	Analisis regresi berupa regresi sederhana, objek penelitian dan periode penelitian tahun 2014-2019.

[58] Lisda Aisyah, Mona Khairida Syafa, dan Ghina Rabban, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022," *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandangan* 1, no. 1 (2023): 27–39, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

[59] Sutikno, Rotinsulu, dan Tumangkeng, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara."

[60] Ibrahim Hasballah, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota," *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 1 (2021): 38–48.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
10	Ainil Zaqiyah, Mike Triani dan Isra Yeni, Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2023.[61]	X_1 = Pendidikan X_2 = Pengangguran X_3 = Jumlah Penduduk Y = Tingkat Kemiskinan	Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.	Variabel X berupa pendidikan dan jumlah penduduk, objek penelitian dan periode penelitian tahun 2016-2021.
11	Ghazy Faden Faadhilah dan Wiwin Priana Primadha, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Terhadap	X_1 = Pertumbuhan Ekonomi X_2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X_3 = Upah Minimum Y = Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan upah minimum kabupaten memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Objek penelitian, variabel X berupa pertumbuhan ekonomi dan IPM, periode Penelitian.

[61] Ainil Zaqiah, Mike Triani, dan Isra Yeni, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 3 (2023): 33, https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	Kemiskinan di Kabupaten Bekasi, 2023.[62]			
12	M. Nasri, dkk., Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan, 2024.[63]	X_1 = Pendidikan X_2 = Upah Minimum X_3 = Indeks Pembangunan Manusia Y = Tingkat Kemiskinan	Pendidikan, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2014-2023.	Variabel X berupa pendidikan dan IPM, objek penelitian.
13	Stepani Ayu Pradipta dan Retno Mustika Dewi, Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan, 2020.[64]	X_1 = Rata-Rata Lama Sekolah X_2 = Pengangguran Terbuka Y = Kemiskinan	Variabel rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Sedangkan variabel pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap	Variabel X berupa rata-rata lama sekolah, objek penelitian yaitu Provinsi Banten, periode penelitian 2011-2015.

[62] Ghazy Faden Faadihilah dan Wiwin Priana Primadha, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 5 (2023): 1794–1801, https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462.

[63] Muhammad Nasri, Syamsu Nujum, dan Aryati Arfah, "Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan," *SEIKO : Journal of Management & Business* 7, no. 2 (2024): 543–55.

[64] Stepanie Ayu Pradipta dan Retno Mustika Dewi, "Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 3 (2020): 109–15, https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
			kemiskinan di Provinsi Banten.	
14	Sitti Rachma Ramadhani Masukr, et al., Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021, 2023.[65]	X_1 = Ketimpangan Pendapatan X_2 = Pengangguran X_3 = Pembangunan manusia Y = Tingkat Kemiskinan	Ketimpangan pendapatan, pengangguran dan IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Variabel X berupa ketimpangan pendapatan dan IPM, objek penelitian, Periode penelitian.
15	Melda Rivana dan Irwan Gani, Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap	X_1 = Tingkat Pengangguran Terbuka X_2 = Indeks Pembangunan Manusia X_3 = Upah Minimum Y = Kemiskinan	Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks pembangunan manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan	Variabel X berupa IPM, objek pesnelitian yaitu Kalimantan Timur, penggunaan data berupa data time series, periode penelitian tahun 2010-2020.

[65] Sitti Rachma Ramadhani Maskur et al., "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021," *Jurnal Progres Ekonomi Pembanguan* 8, no. 1 (2023): 82–95, http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP.

No.	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
	Kemiskinan, 2024.[66]		terhadap kemiskinan. Di sisi lain upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.	

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan

Tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kelayakan hidup pekerja, khususnya dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti layanan kesehatan, produktivitas kerja, serta kesejahteraan secara menyeluruh. Kebijakan ini juga ditujukan untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi pekerja berpendapatan rendah, terutama dari kalangan kurang mampu.[67] Kaufman menyampaikan bahwa peningkatan batas minimum upah dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat karena memberikan dorongan terhadap peningkatan penghasilan, sehingga membantu keluar dari kondisi kemiskinan.[68]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hanifah bersama Nurul Hanifa,[69] menunjukkan bahwa keberadaan upah minimum memberikan pengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sulthon Safiq Alfajri[70] yang menyatakan bahwa penerapan upah minimum memiliki kontribusi nyata dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan rumusan di atas hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1 : Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

[66] Melda Rivana dan Irwan Gani, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2024): 1–20.

[67] Susanto dan Windyastuti, "Increasing the Minimum Wage As a Means of Poverty Alleviation."

[68] Prayoga, Muchtolifah, dan Sishadiyati, "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo."

[69] Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan," *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 191–206, https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632.

[70] Sulthon Safiq Alfajri, "Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)* 1, no. 4 (2024): 1316–29, https://doi.org/https://doi.org/10.70182/JCA.v1i4.24.

Teori yang dikemukakan oleh Sukirno, mengungkapkan bahwa dampak negatif dari pengangguran adalah menurunnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat tingkat kemakmuran seseorang. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, kesejahteraannya pun menurun, dan kondisi ini dapat mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin serta meningkatkan angka kemiskinan secara keseluruhan.[71] Selain itu, Arsyad menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu umumnya tergolong ke dalam kelompok masyarakat yang sangat miskin.[72]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda Rivana bersama Irwan Gani,[73] mengindikasikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di wilayah Kalimantan Timur selama periode 2010 hingga 2020. Penemuan serupa juga tercermin dalam studi oleh Stepanie Ayu Pradipta dan Retno Mustika Dewi[74] yang menemukan bahwa peningkatan angka pengangguran terbuka turut disertai dengan kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Berdasarkan landasan empiris tersebut, maka penelitian ini menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

2.3.3 Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pandangan Arsyad, semakin kecil rasio ketergantungan, maka semakin ringan beban penduduk usia kerja dalam memenuhi kebutuhan kelompok yang tidak berada pada usia produktif. Sebaliknya, ketika rasio ini meningkat, dan tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ekonomi seperti meningkatnya angka kemiskinan.[75]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah bersama Ade Yunita,[76] menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2000 hingga 2019 di wilayah Jawa Barat, rasio ketergantungan memiliki dampak yang nyata dan positif terhadap peningkatan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh studi Fenny Elfride Siagian dan Made Kembar Sri Budhi,[77] yang menemukan bahwa tingginya beban tanggungan dalam keluarga turut memicu

[71] Utami dan Rofiuddin, "Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim."

[72] Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, h. 111*.

[73] Rivana dan Gani, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan."

[74] Pradipta dan Dewi, "Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan."

[75] Siagian dan Budhi, "Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur."

[76] Nurhafizah dan Mafruhat, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019."

[77] Siagian dan Budhi, "Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur."

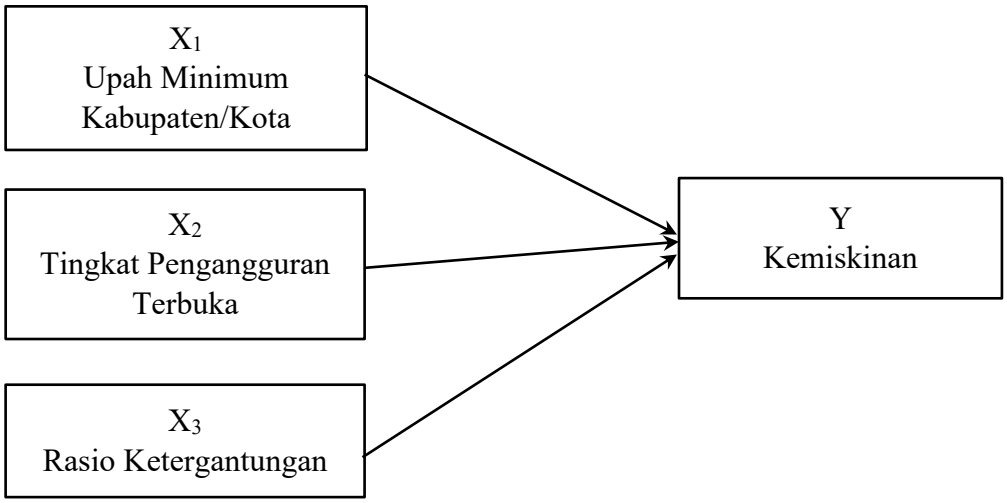
bertambahnya angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini membentuk hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Rasio Ketergantungan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan mengenai upah minimum di tingkat kabupaten/kota, pengangguran terbuka, rasio ketergantungan, serta kemiskinan, dan dengan dukungan hasil-hasil penelitian yang relevan, maka disusun suatu landasan pemikiran yang menjadi pijakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga atau lembaga tertentu dalam bentuk dokumen seperti laporan, buku acuan, publikasi resmi, atau catatan pustaka lainnya.[78] Sumber utama data dalam studi ini diperoleh dari publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada rentang waktu 2020–2024.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan wilayah administratif yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota yang menjadi ruang lingkup pengamatan.[79] Objek atau subjek yang termasuk dalam populasi memiliki karakteristik dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai acuan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu, yang dijadikan objek kajian dalam penelitian. Dalam studi ini, teknik pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode non probability sampling dengan pendekatan total atau sampel jenuh. Metode ini digunakan ketika seluruh elemen populasi dijadikan bagian dari sampel.[80] Dengan demikian, penelitian ini melibatkan seluruh 35 wilayah administratif yang terdiri atas kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini dilakukan dengan menghimpun data sekunder yang bersumber dari instansi resmi dan memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti, yaitu upah minimum tingkat kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, rasio ketergantungan, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2020 hingga 2024.

---

[78] Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: ALFABETA, 2021), h. 46.

[79] Sugiyono, h.167.

[80] Sri Anshori, Muslich, dan Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga Univercity Press (AUP), 2009).

Informasi tersebut diperoleh melalui publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen pemerintah, dan referensi dari studi-studi ilmiah sebelumnya yang mendukung pembahasan teori dan analisis dalam penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori variabel yang digunakan, yakni variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. **Variabel Dependen (Y)**

   Variabel dependen dalam penelitian ini merujuk pada aspek yang dipengaruhi oleh variabel independen. Fokus variabel dependen adalah tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (dikenal sebagai Head Count Index atau P0) di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. **Variabel Independen (X)**

   Variabel independen merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), serta Rasio Ketergantungan (X3).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan
1.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_1)	Upah minimum yang kabupaten/kota yang berlaku di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah	$UMK_t = UMK_{t-1}$ + (Penyesuaian Upah)[81]	Rupiah (Rp)
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2)	Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan.	TPT = Jumlah pengangguran/angkatan kerja x 100%[82]	Persen

[81] Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan."

[82] Astuti, Ratnasari, dan Wibowo, "Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel."

No.	Variabel	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan
3.	Rasio Ketergantungan (X_3)	Perbandingan antara jumlah penduduk non produktif dengan penduduk produktif.	RK = Jumlah penduduk Usia Non Produktif/ Jumlah Penduduk Usia Produktif x 100%[83]	Persen
4.	Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS.	Diukur dengan HCI-P0:[84] $P_0 = \frac{q}{N} \times 100\%$	Persen

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu metode statistik yang menggabungkan antara data runtut waktu (time series) dan data penampang (cross section). Data time series merujuk pada data yang dikumpulkan secara berurutan dalam beberapa periode waktu, seperti tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan, atau bahkan harian. Sementara itu, data cross section merupakan data yang diperoleh dari sejumlah unit atau individu dalam satu titik waktu tertentu, contohnya data dari 34 provinsi atau 40 perusahaan pada satu periode yang sama.[85]

Adapun model persamaan data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = tingkat kemiskinan

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi untuk X_1

β_2 = koefisien regresi untuk X_2

β_3 = koefisien regresi untuk X_3

[83] Nurhuda et al., "Pengaruh Tenaga Kerja dan Dependency Ratio terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara."

[84] Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*.

[85] Algifari, *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11*, 1 ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), h. 3.

X_1 = upah minimum kabupaten/kota

X_2 = tingkat pengangguran terbuka

X_3 = rasio ketergantungan

e = koefisien error

i = jumlah kabupaten/kota yang dianalisis yaitu sejumlah 35 (*Cross section)*

t = periode waktu penelitian yaitu tahun 2020-2024 (*time series)*

3.6.2 Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga model utama yang dapat diterapkan dalam regresi data panel, antara lain:

a. *Common Effects Model* (CEM)

Model ini merupakan bentuk paling dasar dalam pendekatan data panel, karena tidak memasukkan unsur perbedaan antar unit maupun variasi antar waktu. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa seluruh individu memiliki karakteristik perilaku yang seragam dan konsisten selama periode observasi.[86]

***b. Fixed Effects Model* (FEM)**

Model ini mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang mencerminkan adanya variasi pada aspek individual. Dalam pendekatan Fixed Effect, perbedaan tersebut tercermin melalui nilai intersep yang bervariasi antar individu, namun tetap dalam satu periode waktu yang sama. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut, digunakan variabel dummy sebagai alat identifikasi variasi antar individu. Teknik ini dikenal dengan istilah Least Square Dummy Variable (LSDV).[87]

***c. Random effects Model* (REM)**

Model ini digunakan dalam estimasi data panel yang memungkinkan adanya hubungan atau korelasi antar variabel gangguan, baik antar waktu maupun antar individu. Dalam pendekatan ini, perbedaan nilai intersep antar unit dianalisis melalui komponen error masing-masing individu. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Generalized Least Squares (GLS).[88]

---

[86] Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS)* (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 276.

[87] Bambang Juanda Junaidi, *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* (PT Penerbit IPB Press, 2011), h. 180.

[88] Basuki dan Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS), h. 277*.

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan metode estimasi yang paling sesuai, maka dilakukan beberapa uji sebagai berikut.[89]

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan apakah model CEM atau FEM yang lebih cocok digunakan. Hipotesisnya yaitu:

H_0 : *Comman Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Penentuan model dilakukan dengan melihat nilai statistik F dan p-value, yaitu jika Fhitung lebih besar dari nilai F tabel atau p-value lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman yaitu uji yang digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara REM atau FEM. Hipotesisnya yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Keputusan pengujian didasarkan pada nilai statistik uji W yang mengikuti distribusi chi-square, yaitu jika nilai $W > x^2$ atau jika p-value < 0,05, maka model *Fixed Effect* (FEM) lebih baik digunakan.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model REM lebih sesuai dari Model CEM. Hipotesisnya yaitu:

H_0 : *Comman Effect Model* (CEM)

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Dasar pengambilan keputusan yaitu Jika $LM_{hitung} > x^2_{tabel}$ atau jika p-value < 0,05, maka model Random Effect (REM) lebih tepat untuk digunakan.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa uji asumsi yang harus dilakukan dalam regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

[89] Gusti Adi Wibawa dan Wayan Somayasa Fitriani, Ruslan, Herdi Budiman, "Pemodelan Angka Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel di Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika* 4 (2024): 654-655.

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini dilakukan uji Jarque-Berra (uji J-B) untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal atau tidak.[90] Pengambilan keputusan dilihat dari nilai probabilitasnya, yaitu:

1) Jika nilai probabilitas $JB_{statistik} \leq \alpha$ (5%), data berdistibusi tidak normal.
2) Jika nilai probabilitas $JB_{statistik} > \alpha$ (5%), data berdistibusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan korelatif yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Idealnya, model regresi yang baik tidak menunjukkan keterkaitan kuat antar variabel bebas, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih valid dan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, pendeteksian multikolinearitas dilakukan melalui analisis matriks korelasi antar variabel independen. Apabila ditemukan nilai korelasi yang cukup tinggi—biasanya melebihi angka 0,90—maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya masalah multikolinearitas dalam model.[91]

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar observasi dalam model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.[92] Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan pendekatan Uji Glejser dengan kriteria sebagai berikut:

1) Apabila nilai signifikansi > 0,05 , tidak terjadi heteroskedastisitas.
2) Apabila nilai signifikansi < 0,05, terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik, yaitu munculnya korelasi antara nilai residual pada suatu observasi dengan residual pada observasi lainnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksinya adalah Uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut:[93]

1) Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau melebihi (4 – dL), maka terdapat indikasi autokorelasi.

---

[90] Basuki dan Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS),* h.60.

[91] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), h. 107.

[92] Ibid., h. 137.

[93] Basuki dan Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS), h. 60*.

2) Jika DW berada di antara dU dan (4 – dU), maka tidak ditemukan autokorelasi.
3) Apabila DW berada di antara dL dan dU, atau antara (4 – dU) dan (4 – dL), maka tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti mengenai ada tidaknya autokorelasi.

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada.

a. Uji t (uji parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen: adapun hipotesis yang digunakan yaitu:[94]

H_0 : Apabila t hitung < t tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Apabila t hitung > t tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Apabila nilai R^2 dalam model regresi mendekati nol menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.[95]

[94] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Tri Koryati (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), h. 53-54.

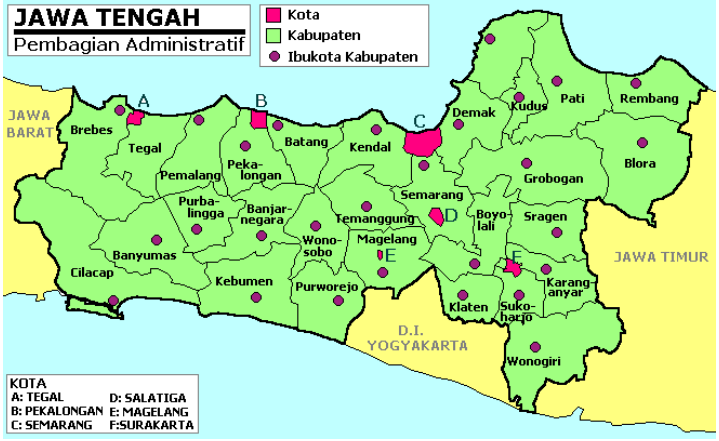
[95] *Ibid.*, h.54.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Wikipedia

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa, dan secara geografis terletak di antara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat di sebelah barat dan Jawa Timur di sebelah timur. Secara astronomis, provinsi ini berada di antara 5°40’ hingga 8°30’ Lintang Selatan dan 108°30’ hingga 111°30’ Bujur Timur. Secara administratif, Jawa tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah provinsi ini mencapai 3,43 juta hektar, yang mencakup sekitar 25,04% dari total luas Pulau Jawa.[96]

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 30.775.846 Jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1,767 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (1,644 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,603 juta jiwa). Dari jumlah penduduk tersebut, 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan perkhidmatan (10,98%).[97]

4.1.2 Gambaran Umum Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Kemiskinan merupakan salah satu parameter utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Di wilayah Jawa Tengah, kondisi kemiskinan diukur melalui persentase penduduk miskin, yaitu jumlah individu dengan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Data dari tahun 2020 hingga 2024

[96] BPS Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*, vol. 50 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025).

[97] “Jawa Tengah,” Wikipedia, n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah. Diakses pada 25 Mei 2025.

menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di setiap kabupaten/kota mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi. Secara khusus, terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang banyak dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020–2021, yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, tren tersebut mulai membaik pada periode 2022–2024, ketika pemulihan ekonomi mulai berjalan dan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah mulai menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Sumber data berasal dari publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Rincian mengenai perkembangan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PROVINSI JAWA TENGAH	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47
Kabupaten Cilacap	11,46	11,67	11,02	10,99	10,68
Kabupaten Banyumas	13,26	13,66	12,84	12,53	11,95
Kabupaten Purbalingga	15,9	16,24	15,3	14,99	14,18
Kabupaten Banjarnegara	15,64	16,23	15,2	14,9	14,71
Kabupaten Kebumen	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71
Kabupaten Purworejo	11,78	12,4	11,53	11,33	10,87
Kabupaten Wonosobo	17,36	17,67	16,17	15,58	15,28
Kabupaten Magelang	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83
Kabupaten Boyolali	10,18	10,62	9,82	9,81	9,63
Kabupaten Klaten	12,89	13,49	12,33	12,28	12,04
Kabupaten Sukoharjo	7,68	8,23	7,61	7,58	7,47
Kabupaten Wonogiri	10,86	11,55	10,99	10,94	10,71
Kabupaten Karanganyar	10,28	10,68	9,85	9,79	9,59
Kabupaten Sragen	13,38	13,83	12,94	12,87	12,41
Kabupaten Grobogan	12,46	12,74	11,8	11,72	11,43
Kabupaten Blora	11,96	12,39	11,53	11,49	11,42
Kabupaten Rembang	15,6	15,8	14,65	14,17	14,02
Kabupaten Pati	10,08	10,21	9,33	9,31	9,17
Kabupaten Kudus	7,31	7,6	7,41	7,24	7,23
Kabupaten Jepara	7,17	7,44	6,88	6,61	6,09
Kabupaten Demak	12,54	12,92	12,09	12,01	11,89
Kabupaten Semarang	7,51	7,82	7,27	7,17	6,96
Kabupaten Temanggung	9,96	10,17	9,33	9,26	8,67
Kabupaten Kendal	9,99	10,24	9,48	9,39	9,35
Kabupaten Batang	9,13	9,68	8,98	8,92	8,73
Kabupaten Pekalongan	10,19	10,57	9,67	9,67	8,95
Kabupaten Pemalang	16,02	16,56	15,06	15,03	14,92
Kabupaten Tegal	8,14	8,6	7,9	7,3	6,81
Kabupaten Brebes	17,03	17,43	16,05	15,78	15,6
Kota Magelang	7,58	7,75	7,1	6,11	5,94
Kota Surakarta	9,03	9,4	8,84	8,44	8,31
Kota Salatiga	4,94	5,14	4,73	4,66	4,57
Kota Semarang	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03
Kota Pekalongan	7,17	7,59	7	6,81	6,71
Kota Tegal	7,8	8,12	7,91	7,68	7,64

Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

4.1.3 Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan Daerah. Selama periode 2020-2024, UMK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun dengan persentase kenaikan yang bervariasi. Data lengkap mengenai perkembangan UMK di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Cilacap	Rp2.158.327	Rp2.228.904	Rp2.230.731	Rp2.383.090	Rp2.479.106
Kab. Banyumas	Rp1.900.000	Rp1.970.000	Rp1.983.261	Rp2.118.124	Rp2.195.690
Kab. Purbalingga	Rp1.940.800	Rp1.988.000	Rp1.996.814	Rp2.130.981	Rp2.195.571
Kab. Banjarnegara	Rp1.748.000	Rp1.805.000	Rp1.819.835	Rp1.958.170	Rp2.038.005
Kab. Kebumen	Rp1.835.000	Rp1.895.000	Rp1.906.781	Rp2.035.890	Rp2.127.641
Kab. Purworejo	Rp1.845.000	Rp1.905.400	Rp1.911.850	Rp2.043.902	Rp2.121.947
Kab. Wonosobo	Rp1.859.000	Rp1.920.000	Rp1.931.285	Rp2.076.209	Rp2.159.175
Kab. Magelang	Rp2.042.200	Rp2.075.000	Rp2.081.807	Rp2.236.777	Rp2.316.890
Kab. Boyolali	Rp1.942.500	Rp2.000.000	Rp2.010.299	Rp2.155.712	Rp2.250.327
Kab. Klaten	Rp1.947.821	Rp2.011.515	Rp2.015.623	Rp2.152.323	Rp2.244.012
Kab. Sukoharjo	Rp1.938.000	Rp1.986.450	Rp1.998.153	Rp2.138.248	Rp2.215.482
Kab. Wonogiri	Rp1.797.000	Rp1.827.000	Rp1.839.043	Rp1.968.448	Rp2.047.500
Kab. Karanganyar	Rp1.989.000	Rp2.054.040	Rp2.064.313	Rp2.207.484	Rp2.288.366
Kab. Sragen	Rp1.815.915	Rp1.829.500	Rp1.839.429	Rp1.969.569	Rp2.049.000
Kab. Grobogan	Rp1.830.000	Rp1.890.000	Rp1.894.032	Rp2.029.569	Rp2.116.516
Kab. Blora	Rp1.834.000	Rp1.894.000	Rp1.904.196	Rp2.040.080	Rp2.101.813
Kab. Rembang	Rp1.802.000	Rp1.861.000	Rp1.874.322	Rp2.015.927	Rp2.099.689
Kab. Pati	Rp1.891.000	Rp1.953.000	Rp1.968.339	Rp2.107.697	Rp2.190.000
Kab Kudus	Rp2.218.452	Rp2.290.995	Rp2.293.058	Rp2.439.814	Rp2.516.888
Kab. Jepara	Rp2.040.000	Rp2.107.000	Rp2.108.403	Rp2.272.627	Rp2.450.915
Kab. Demak	Rp2.432.000	Rp2.511.526	Rp2.513.005	Rp2.680.421	Rp2.761.236
Kab. Semarang	Rp2.229.881	Rp2.302.798	Rp2.311.254	Rp2.480.988	Rp2.582.287
Kab. Temanggung	Rp1.825.200	Rp1.885.000	Rp1.887.832	Rp2.027.569	Rp2.109.690
Kab. Kendal	Rp2.261.775	Rp2.335.735	Rp2.340.312	Rp2.508.300	Rp2.613.573
Kab. Batang	Rp2.061.700	Rp2.129.117	Rp2.135.535	Rp2.282.026	Rp2.379.702
Kab. Pekalongan	Rp2.018.161	Rp2.084.155	Rp2.094.646	Rp2.247.346	Rp2.334.886
Kab. Pemalang	Rp1.865.000	Rp1.926.000	Rp1.940.890	Rp2.081.783	Rp2.156.000
Kab. Tegal	Rp1.896.000	Rp1.958.000	Rp1.968.446	Rp2.106.238	Rp2.191.161
Kab. Brebes	Rp1.807.614	Rp1.866.723	Rp1.885.019	Rp2.018.837	Rp2.103.100
Kota Magelang	Rp1.853.000	Rp1.914.000	Rp1.935.913	Rp2.066.007	Rp2.142.000
Kota Surakarta	Rp1.956.200	Rp2.013.810	Rp2.035.720	Rp2.174.169	Rp2.269.070
Kota Salatiga	Rp2.034.915	Rp2.101.457	Rp2.128.523	Rp2.284.180	Rp2.378.951
Kota Semarang	Rp2.715.000	Rp2.810.025	Rp2.835.021	Rp3.060.349	Rp3.243.969
Kota Pekalongan	Rp2.072.000	Rp2.139.754	Rp2.156.213	Rp2.305.823	Rp2.389.801
Kota Tegal	Rp1.925.000	Rp1.982.750	Rp2.005.930	Rp2.145.012	Rp2.231.628

Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

4.1.4 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja. Di Provinsi Jawa Tengah, TPT antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Selama periode tersebut, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap tercatat sebagai daerah dengan angka TPT tertinggi, sedangkan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonogiri merupakan daerah dengan angka TPT terendah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PROVINSI JAWA TENGAH	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Kabupaten Cilacap	9,1	9,97	9,62	8,74	7,83
Kabupaten Banyumas	6	6,05	6,05	6,35	6,18
Kabupaten Purbalingga	6,1	6,05	5,23	5,61	4,96
Kabupaten Banjarnegara	5,86	5,86	6,38	6,26	5,57
Kabupaten Kebumen	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07
Kabupaten Purworejo	4,04	3,59	4,45	4,02	3,89
Kabupaten Wonosobo	5,37	5,26	5,01	4,95	4,02
Kabupaten Magelang	4,27	5,03	4,97	4,42	3,55
Kabupaten Boyolali	5,28	5,09	4,92	4,05	3,16
Kabupaten Klaten	5,46	5,48	4,31	4,2	3,97
Kabupaten Sukoharjo	6,93	3,32	2,47	3,4	3,65
Kabupaten Wonogiri	4,27	2,43	1,95	1,92	2,4
Kabupaten Karanganyar	5,96	5,89	5,7	4,35	3,47
Kabupaten Sragen	4,75	4,76	4,69	3,87	3,53
Kabupaten Grobogan	4,5	4,38	4,4	4,02	3,23
Kabupaten Blora	4,89	3,81	3,7	3,1	3,67
Kabupaten Rembang	4,83	3,67	1,76	2,6	2,84
Kabupaten Pati	4,74	4,6	4,45	4,29	3,87
Kabupaten Kudus	5,53	3,77	3,21	3,25	3,19
Kabupaten Jepara	6,7	4,23	4,1	3,35	3,34
Kabupaten Demak	7,31	5,28	6,11	5,38	4,75
Kabupaten Semarang	4,57	5,02	4,81	4,05	3,73
Kabupaten Temanggung	3,85	2,62	2,54	2,32	2,35
Kabupaten Kendal	7,56	7,55	7,34	5,76	5,01
Kabupaten Batang	6,92	6,59	6,64	6,06	5,67
Kabupaten Pekalongan	6,97	4,28	3,23	3,25	3,3
Kabupaten Pemalang	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63
Kabupaten Tegal	9,82	9,97	9,64	8,6	7,53
Kabupaten Brebes	9,83	9,78	9,48	8,98	8,35
Kota Magelang	8,59	8,73	6,71	5,25	4,4
Kota Surakarta	7,92	7,85	5,83	4,58	4,61
Kota Salatiga	7,44	7,26	5,58	4,57	3,86
Kota Semarang	9,57	9,54	7,6	5,99	5,82
Kota Pekalongan	7,02	6,89	4,98	5,02	4,91
Kota Tegal	8,4	8,25	6,68	6,05	5,88

Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

4.1.5 Gambaran Umum Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah

Rasio ketergantungan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup besar selama periode 2020-2024. Daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Kota Semarang cenderung memiliki rasio ketergantungan yang lebih rendah. Sedangkan kabupaten seperti Boyolali, Wonosobo dan Kebumen memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi. Perbedaan ini mencerminkan beban ekonomi yang berbeda antar wilayah, di mana semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tekanan terhadap penduduk usia produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga yang produktif. Data lengkap mengenai Rasio Ketergantungan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PROVINSI JAWA TENGAH	47,76	46,34	43,72	44,12	44,5
Kabupaten Cilacap	51,52	50,48	43,69	44,51	44,88
Kabupaten Banyumas	49,85	49,47	46,31	45,5	45,75
Kabupaten Purbalingga	52,18	50,51	46,95	46,44	46,56
Kabupaten Banjarnegara	49,4	47,75	45,69	45,99	46,36
Kabupaten Kebumen	56,01	54,61	46,38	46,01	46,39
Kabupaten Purworejo	54,57	53,1	45,85	46,14	46,76
Kabupaten Wonosobo	51,22	49,55	43,94	44,74	45,19
Kabupaten Magelang	48,7	46,93	44,06	44,52	44,92
Kabupaten Boyolali	51,33	49,69	46,46	46,67	47,02
Kabupaten Klaten	49,01	47,98	44,84	44,39	44,67
Kabupaten Sukoharjo	44,48	43,52	43,38	42,98	43,15
Kabupaten Wonogiri	51,93	51,07	47,03	47,12	47,77
Kabupaten Karanganyar	47,06	45,58	45,4	45,74	45,94
Kabupaten Sragen	48,93	47,68	46,11	45,92	46,14
Kabupaten Grobogan	48,28	46,53	43,87	44,75	45,36
Kabupaten Blora	47,03	45,52	40,81	41,71	42,38
Kabupaten Rembang	42,68	41,27	41,38	42,77	43,5
Kabupaten Pati	45,78	44,37	41,67	42,66	43,19
Kabupaten Kudus	40,91	39,58	40,7	41,64	42,1
Kabupaten Jepara	46,86	45,08	42,78	43,05	43,25
Kabupaten Demak	45,77	43,97	43,04	43,76	44,14
Kabupaten Semarang	45,59	44,35	42,43	43,2	43,64
Kabupaten Temanggung	46,51	45,24	44,15	44,79	45,23
Kabupaten Kendal	45,31	44,41	40,66	41,73	42,27
Kabupaten Batang	44,96	43,51	42,63	44,02	44,59
Kabupaten Pekalongan	49,33	47,56	43,49	45	45,41
Kabupaten Pemalang	51,21	49,75	43,79	43,71	44,17
Kabupaten Tegal	50,63	48,33	44,06	44,19	44,43
Kabupaten Brebes	49,11	47,81	43,8	43,44	43,75
Kota Magelang	41,63	40,67	41,6	41,34	41,69
Kota Surakarta	37,8	37	42,01	42,09	42,42
Kota Salatiga	40,52	39,34	42,19	42,76	43,16
Kota Semarang	38,89	37,16	40,43	40,38	40,66
Kota Pekalongan	42,12	40,6	41,42	42,45	42,95
Kota Tegal	42,79	41,18	42,11	42,98	43,37

Sumber: https://jateng.bps.go.id/id (Data diolah)

4.2 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 wilayah sebagai objek penelitian. Periode data yang digunakan adalah tahun 2020 hingga 2024. Variabel yang dianalisis meliputi Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2), Rasio Ketergantungan (X_3), dan Kemiskinan (Y). Hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	2112384.	5.401143	44.96234	10.70269
Median	2066007.	5.030000	44.52000	10.57000
Maximum	3243969.	9.970000	56.01000	17.83000
Minimum	1748000.	1.760000	37.00000	4.030000
Std. Dev.	243104.6	1.908634	3.317156	3.360536
Skewness	1.531843	0.570592	0.601220	0.199032
Kurtosis	6.449176	2.808957	3.686146	2.296355
Jarque-Bera	155.1884	9.762083	13.97564	4.765619
Probability	0.000000	0.007589	0.000923	0.092291
Sum	3.70E+08	945.2000	7868.410	1872.970
Sum Sq. Dev.	1.03E+13	633.8616	1914.613	1965.017
Observations	175	175	175	175

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel upah minimum kabupaten/kota (X_1), memiliki rata- rata sebesar Rp2.112.384, nilai maksimum Rp3.243.969 ada pada Kota Semarang pada tahun 2024. sedangkan nilai minimum Rp1.748.000 ada pada Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020. Standar deviasi sebesar Rp243.104,6 menunjukkan bahwa terdapat variasi cukup tinggi antar kabupaten/kota. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data tergolong homogen.
2. Nilai rata-rata variabel tingkat pengangguran terbuka (X_2) sebesar 5,40% dengan nilai maksimum 9,97% ada pada Kabupaten Cilacap dan Kota Tegal pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum 1,76% ada pada Kabupaten Rembang pada tahun 2022. Nilai standar deviasi sebesar 1,91%. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen.
3. Nilai rata-rata variabel rasio ketergantungan (X_3) sebesar 44,96% dengan nilai maksimum 56,01% dan minimum 37,00%. Nilai standar deviasi sebesar 3,32% menunjukkan bahwa sebaran nilai rasio ketergantungan tidak terlalu menyimpang dengan rata-rata. Sehingga, data bersifat homogen.

4. Nilai rata-rata variabel kemiskinan (Y) sebesar 10,70%. Nilai maksimum sebesar 17,83% ada pada Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, sedangkan nilai minimum sebesar 4,03% ada pada Kota Semarang pada tahun 2024 . Nilai standar deviasi sebesar 3,36% lebih kecil dari nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Model Estimasi Data Panel

A. *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 4.6 Hasil UJji Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	136.5424	31.75236	4.300229	0.0000
LOGX1	-9.988057	2.076532	-4.809970	0.0000
X2	0.074728	0.103893	0.719274	0.4730
X3	0.426041	0.067549	6.307150	0.0000

Root MSE	2.583799	R-squared	0.405449
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.395018
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	2.613845
Akaike info criterion	4.782113	Sum squared resid	1168.303
Schwarz criterion	4.854451	Log likelihood	-414.4349
Hannan-Quinn criter.	4.811456	F-statistic	38.87061
Durbin-Watson stat	0.117252	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Dari hasil regresi di atas menunjukkan adanya konstanta sebesar 136.5424 dengan tingkat probabilitas 0.0000. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.395018 mengartikan bahwa variabel kemiskinan dipengaruhi oleh variabel upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan sebesar 39% dan sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.7 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.304438	R-squared	0.991746
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.989517
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	0.344079
Akaike info criterion	0.893587	Sum squared resid	16.21944
Schwarz criterion	1.580798	Log likelihood	-40.18888
Hannan-Quinn criter.	1.172339	F-statistic	444.8870
Durbin-Watson stat	2.665441	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Dari hasil pengujian di atas, menunjukkan nilai konstanta sebesar 85.48829 dengan tingkat probabilitas 0.0000. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,989517 mengartikan bahwa variabel kemiskinan dipengaruhi oleh variabel upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan sebesar 98,95%. Adapun sisanya sebesar 1,05% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

C. *Random Effect Model* (REM)

Tabel 4.8 Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	88.75430	11.19337	7.929184	0.0000
LOGX1	-5.628426	0.739727	-7.608790	0.0000
X2	0.020468	0.040264	0.508351	0.6119
X3	0.083904	0.014279	5.876000	0.0000

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		2.478982	0.9811
Idiosyncratic random		0.344079	0.0189
Weighted Statistics			
Root MSE	0.354614	R-squared	0.572297
Mean dependent var	0.663066	Adjusted R-squared	0.564793
S.D. dependent var	0.543787	S.E. of regression	0.358737
Sum squared resid	22.00641	F-statistic	76.26996
Durbin-Watson stat	1.978781	Prob(F-statistic)	0.000000
Unweighted Statistics			
R-squared	0.227625	Mean dependent var	10.70269
Sum squared resid	1517.730	Durbin-Watson stat	0.028691

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Dari hasil pengujian di atas, menunjukkan nilai konstanta sebesar 88.75430 dengan tingkat probabilitas 0.0000. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,564793 mengartikan bahwa variabel kemiskinan dipengaruhi oleh variabel upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan sebesar 56,47% dan sisanya sebesar 43,53% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

4.3.2 Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara CEM atau FEM. Hipotesisnya yaitu:

H_0 : *Comman Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan Uji Chow, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	286.213411	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	748.492061	34	0.0000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil Uji Chow di atas, nilai probabilitas dari Cross-section Chi-Square adalah 0.0000 menunjukkan < 0.005, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terpilih dan paling tepat yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik antara REM atau FEM. Hipotesisnya yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila nilai probabilitas Cross-section random lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya apabila nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel 4.10 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.880561	3	0.0005

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0005 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan adalah model Fixed Effect karena dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan model Random Effect.

Hasil Uji Chow menunujukkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan dengan CEM, sedangkan Uji Hausman menunjukkan bahwa FEM juga lebih baik dibandingkan dengan REM. Dengan demikian, kedua pengujian tersebut secara konsisten mengarah pada penggunaan FEM sebagai model yang paling sesuai, sehingga tidak diperlukan lagi Uji Legrange Multiplier.

4.3.3 Hasil Estimasi Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pengujian pemilihan model diperoleh kesimpulan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil estimasi model FEM tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.304438	R-squared	0.991746
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.989517
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	0.344079
Akaike info criterion	0.893587	Sum squared resid	16.21944
Schwarz criterion	1.580798	Log likelihood	-40.18888
Hannan-Quinn criter.	1.172339	F-statistic	444.8870
Durbin-Watson stat	2.665441	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil estimasi di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y_{it} = 85.48829 - 5.399442\ LogX1_{it} + 0.030543\ X2_{it} + 0.081195\ X3_{it} + } e_{it}$$

Berikut adalah interpretasi dari model yang dianalisis:

1. Angka konstanta 85,48829 merepresentasikan perkiraan awal tingkat kemiskinan (Y) ketika semua faktor independen dianggap tidak memiliki nilai (nol). Ini menyiratkan bahwa jika upah minimum kabupaten/kota (Log X1), persentase pengangguran terbuka (X2), dan rasio ketergantungan (X3) tidak ada, maka tingkat kemiskinan yang diprediksi adalah 85,49%.
2. Sementara itu, variabel upah minimum kabupaten/kota (Log X1) memiliki koefisien -5.399442, yang mengindikasikan hubungan berlawanan dengan variabel kemiskinan. Secara spesifik, setiap kenaikan satu persen pada upah minimum kabupaten/kota diperkirakan akan mengurangi persentase kemiskinan sebesar 5,4%, dengan syarat variabel lain dijaga tetap. Karena koefisien ini signifikan pada tingkat statistik (0,0000 < 0,05), dapat disimpulkan secara kuat bahwa upah minimum kabupaten/kota memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah dalam rentang tahun 2020-2024.
3. Koefisien variabel Tingkat pengangguran terbuka (X_2) sebesar 0,030543 menunjukkan hubungan positif dengan kemiskinan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik (0,4603 > 0,05). Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada periode 2020-2024.
4. Untuk variabel rasio ketergantungan (X3), koefisiennya 0,081195, menandakan hubungan positif dengan kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan 1% rasio ini meningkatkan kemiskinan sebesar 0,08%, jika variabel lain tetap. Koefisien ini signifikan secara statistik (0,0000 < 0,05), menegaskan pengaruh positif dan signifikan rasio ketergantungan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah (2020-2024).

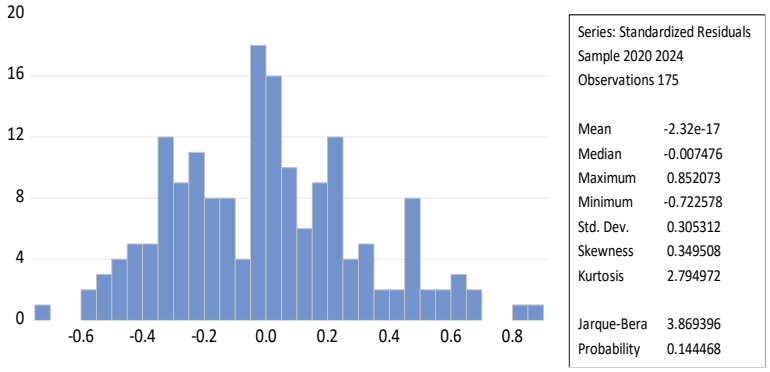
4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat dasar agar hasil estimasi yang diperoleh valid dan reliabel. Berikut ini merupakan hasil pengujian terhadap uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas yang telah dilakukan:

Tabel 4.12 Uji Normallitas



Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai Probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,166805 lebih besar dari taraf signifikansi 0,005 (0,144468 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi dikatakan baik jika antar variabel independennya tidak saling berkorelasi, sehingga terhindar dari multikolinearitas. Gejala multikolinearitas muncul ketika nilai koefisien korelasi antar variabel independen melebihi 0,90.[98] Sebaliknya, jika nilai korelasi berada di bawah angka tersebut maka model terbebas dari multikolinearitas. Berikut merupakan hasil ujinya:

Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas

	LOGX1	X2	X3
LOGX1	1.000000	0.034087	-0.466635
X2	0.034087	1.000000	-0.029627
X3	-0.466635	-0.029627	1.000000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,90, yang merupakan batas umum untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

[98] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah terjadi kesamaan variance residual pada sebuah model regresi. Uji Glejser dilakukan untuk mendeteksi adanaya heteroskedastisitas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.574778	2.684892	1.703897	0.0907
LOG(X1)	-0.322334	0.177599	-1.814962	0.0717
X2	0.003565	0.009680	0.368296	0.7132
X3	0.004966	0.003364	1.476481	0.1421

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode uji glejser, diperoleh bahwa nilai probabilitas dari seluruh variabel independen berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menandakan tidak adanya hubungan sistematis antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan) terhadap variabel dependen (Kemiskinan). Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) dan untuk nilai t tabelnya dicari menggunakan Microsoft Excel dengan rumus =TINV(α;df). *Degree of freedom* (df) atau derajat bebas diperoleh dari rumus df =(n-k). Dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Diketahui jumlah sampel (n) sebesar 175 dan jumlah variabel (k) adalah 4, sehingga nilai df adalah 171 dan dapat diperoleh nilai t tabel sebesar 1,973934 ≈ 1,9734.

Tabel 4.15 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

Hasil dari pengujian t yang telah dilakukan menunjukkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

   H_0 : Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

   H_a : Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

   Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel X_1 (upah minimum kabupaten/kota) memiliki nilai t ststistik sebesar -7,134860 dengan nilai signifikansi 0,0000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Karena nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel (7,134860 > 1,974), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, upah minimum kabupaten/kota terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2020-2024.

b. Hipotesis kedua (H2) berasumsi bahwa:

   H_0 : Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

   H_a : Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

   Hasil pengujian menunjukkan nilai t statistik untuk variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,740481 dengan tingkat signifikansi 0,4603 > 0,05. Karena nilai t statistik lebih kecil dari t tabel (0,740481 < 1,9734), maka terima H_0 dan H_2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2024.

c. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa:

   H_0 : Rasio Ketergantungan tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

   H_a : Rasio Ketergantungan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

   Berdasarkan hasil analisis, nilai t statistik untuk variabel rasio ketergantungan adalah sebesar 5,665129 dengan tingkat signifikansi 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Karena nilai t statistik tersebut melebihi nilai t tabel (5,665129 > 1,9734), maka hipotesis H3 dapat diterima dan H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin besar rasio ketergantungan, maka persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 cenderung meningkat.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merepresentasikan seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R-squared (R^2) berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Pada penelitian ini, nilai Adjusted R-squared yang diperoleh adalah sebesar 0,989517. Artinya, sekitar 98,95% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio ketergantungan. Adapun sisanya, yaitu sekitar 1,05%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	0.991746
Adjusted R-squared	0.989517
S.E. of regression	0.344079
Sum squared resid	16.21944
Log likelihood	-40.18888
F-statistic	444.8870
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data hasil perhitungan EViews 12, 2025

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota (X1) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020 hingga 2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik sebesar 7,134860 yang lebih besar dari t tabel (1,974) serta nilai signifikansi 0,0000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, peningkatan upah minimum kabupaten/kota berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Temuan ini sejalan dengan konsep teori lingkaran setan kemiskinan, yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan (melalui upah minimum) dapat memperbaiki daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. penghasilan rendah, ketika menerima upah yang lebih tinggi, memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga secara langsung dapat membantu menekan angka kemiskinan melalui peningkatan akses ekonomi bagi rumah tangga kurang mampu.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan bagian dari prinsip keadilan distribusi (al-adalah) dan kesejahteraan (falah). Islam mendorong negara untuk menjamin bahwa seluruh rakyat terutama kelompok rentan dan miskin, dapat hidup dengan layak. Kenaikan upah minimum dapat menjadi instrumen distribusi pendapatan yang adil, sebagaimana diajarkan dalam prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Dengan demikian, kebijakan UMK yang efektif bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Namun demikian, karakteristik ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor Informal. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2024, tercatat bahwa 60% penduduk bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 40% yang bekerja di sektor formal yang terpengaruh langsung oleh kebijakan UMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara statistik UMK berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan, efeknya lebih besar dirasakan oleh kelompok pekerja formal, sedangkan kelompok informal hanya merasakan dampak tidak langsung.

Fenomena ketidaksesuaian antara kenaikan UMK dan penurunan kemiskinan juga sempat terjadi pada tahun 2021, di mana UMK meningkat tetapi angka kemiskinan justru naik. Hal tersebut disebabkan oleh dampak pemulihan pasca pandemi Covid-19, di man banyak pelaku usaha yang beroperasi secara optimal, meningkatnya PHK, serta jam kerja yang menurun terutama di sektor informal. Kondisi ini menyebabkan kenaikan UMK belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, karena sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal yang tidak terjangkau oleh kebijakan UMK. Meskipun demikian, kebijakan kenaikan UMK tetap berperan penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sektor formal tetap menjadi penggerak utama dalam perekonomian, yang dapat menghasilkan efek pengganda terhadap kelompok masyarakat lainnya termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya, seperti oleh S. Hanifa dan Nurul Hanifa,[99] yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan yang sejenis juga terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Sulthon Safiq Alfajri,[100] yang menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum cenderung diikuti oleh

[99] Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan," *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 191–206.

[100] Sulthon Safiq Alfajri, "Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)* 1, no. 4 (2024), h. 1316..

penurunan jumlah penduduk miskin. Ketika pendapatan meningkat, rumah tangga menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan pokok secara layak, sehingga risiko untuk mengalami kondisi miskin dapat ditekan.

4.4.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020 hingga 2024. Hal ini dibuktikan oleh nilai t statistik sebesar 0,740481 yang lebih kecil dibandingkan t tabel (1,974), serta nilai signifikansi sebesar 0,4603 yang melebihi batas 0,05. Dengan demikian, fluktuasi pada tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan dampak signifikan terhadap angka kemiskinan di wilayah tersebut. Artinya, naiknya angka pengangguran terbuka tidak secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat dijelaskan melalui sejumlah kondisi faktual yang mencerminkan karakteristik ketenagakerjaan di Jawa Tengah, yang tidak sepenuhnya tercermin dalam indikator pengangguran terbuka.

Temuan ini tidak sejalan dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang memperkuat siklus kemiskinan. Dalam teori tersebut, pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan, yang berdampak pada menurunnya konsumsi, tabungan, serta produktivitas, sehingga kemiskinan terus berlanjut. Namun, kondisi faktual di lapangan memperlihatkan dinamika yang berbeda. Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih didominasi oleh sektor informal dan pertanian, di mana sebagian besar masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan data Sakernas (2023), sekitar 12,07 juta penduduk atau setara dengan 60,39% bekerja di sektor informal. Individu yang berada di sektor ini umumnya berpenghasilan rendah, namun tidak termasuk dalam kategori pengangguran secara statistik.

Selain itu, tingginya proporsi pekerja setengah menganggur (*underemployment*) juga perlu diperhatikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat setengah pengangguran di Jawa Tengah meningkat dari 6,40% pada tahun 2023 menjadi 7,48% pada 2024.[101] Artinya, meskipun secara data mereka diklasifikasikan sebagai tenaga kerja aktif, jumlah jam kerja mereka masih belum memenuhi standar minimum (kurang dari 35 jam per minggu) dan sering kali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun

[101] "Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi," 2025, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MSMy/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html.

keterampilan yang dimiliki. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja formal berada dalam kondisi kerja yang belum ideal dan rentan terhadap kemiskinan.

Karakteristik pengangguran terbuka di Jawa Tengah juga di dominasi oleh pengangguran terdidik. BPS mencatat bahwa pada tahun 2023, sebesar 8,53% pengangguran terbuka berasal dari lulusan menengah, dan 5,49% dari lulusan perguruan tinggi. Sementara itu pengangguran, dengan tingkat pendidikan rendah hanya sebesar 3,49%.[102] Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka banyak terjadi pada individu yang berasal dari keluarga dengan latar belakang menengah ke atas, yang masih memiliki akses seperti dukungan keluarga atau tabungan. Karena itu, meskipun menganggur, mereka belum tentu tergolong miskin. Sebaliknya, kelompok miskin sering bekerja di sektor informal berupah rendah, sehingga tidak tercatat sebagai pengangguran terbuka.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini dapat dipahami melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Ekonomi Islam tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi formalitas kerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan riil masyarakat, termasuk pekerja informal dan mereka yang mengalami setengah pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kerja dan distribusi pendapatan yang adil sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian dalam konteks penelitian ini, fluktuasi tingkat pengangguran terbuka tidak selalu berdampak langsung terhadap perubahan angka kemiskinan, sehingga hubungan antara keduanya tidak selalu berjalan searah seperti yang dijelaskan dalam teori. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifah dan Imaningsih,[103] yang menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan serupa juga ditunjukkan oleh studi dari Tia Handani dan Joko,[104] yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

[102] "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023," 2025, https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyOCMy/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-tingkat-pendidikan-di-jawa-tengah.html.

[103] Khindya Indy Alifah dan Niniek Imaningsih, "Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Tebuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 1.

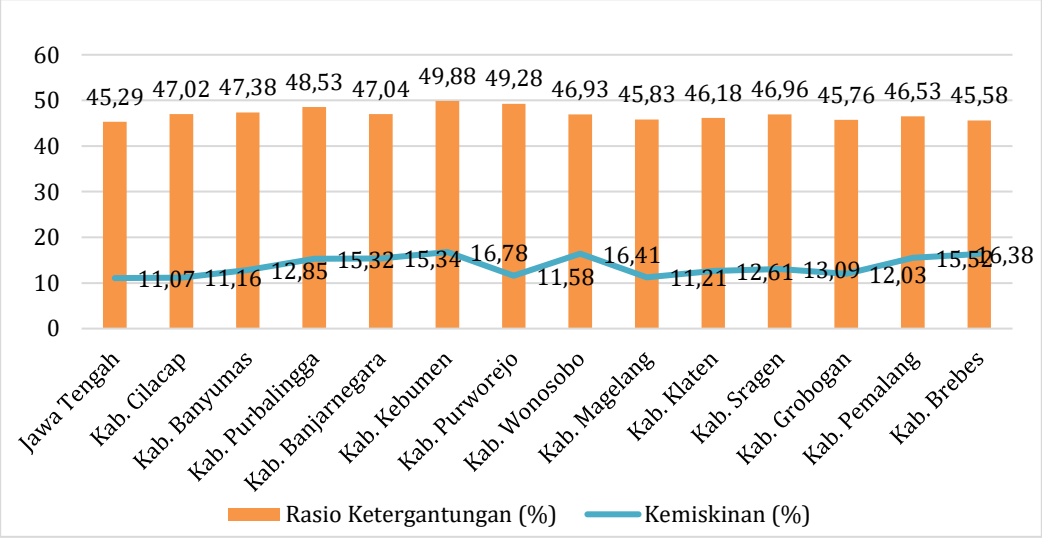
[104] Tia Handani dan Joko Suharianto, "Pengaruh TPT , PDRB , dan TPAK Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023" 3, no. April (2025): 22.

4.4.3 Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data serta uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Ketergantungan (X3) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai t statistik sebesar 5,665129 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,974, serta nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan kata lain, semakin besar rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut.

Temuan ini selaras dengan konsep dalam teori lingkaran setan kemiskinan, yang menyatakan bahwa tingginya rasio ketergantungan mencerminkan beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia non-produktif. Beban ini berdampak pada meningkatnya risiko kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan dan produktivitas. Kondisi ini tercermin dalam data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2024, di mana sejumlah kabupaten dengan rasio ketergantungan yang tinggi juga mencatat tingkat kemiskinan yang melebihi rata-rata provinsi. Fenomena ini dapat diamati lebih lanjut pada data berikut:

Tabel 4.17 Perbandingan Rata-Rata Rasio Ketregantungan dengan Rata-Rata Kemiskinan Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, Data diolah (2025)

Mengacu pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kebumen mencatat rasio ketergantungan tertinggi, yakni sebesar 49,88%, disertai dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 16,78%, yang jauh melampaui rata-rata provinsi sebesar 11,07%. Beberapa kabupaten lain seperti Purbalingga (48,53%), Banjarnegara (47,04%), dan Wonosobo (46,93%) juga menunjukkan kecenderungan serupa, di mana tingginya rasio ketergantungan disertai dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, masing-masing

sebesar 15,32%, 15,34%, dan 16,41%. Data ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia produktif di wilayah tersebut cukup besar, sehingga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil analisis bahwa rasio ketergantungan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini dapat dipahami memlaui prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi yang harus dipikul oleh kelompok usia produktif. Ekonomi Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan tolong menolong, sehingga beban ekonomi tidak hanya ditanggung oleh individu atau keluarga tertentu, melainkan harus ada mekanisme sosial yang membantu meringankan beban tersebut. Dalam hal ini, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi beban ketergantungan dan angka kemiskinan.

Selain itu, meskipun Jawa Tengah sedang mengalami bonus demografi dengan penduduk usia yang produktif yang lebih besar, namun belum semua wilayah mampu memanfaatkannya secara optimal. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, serta distribusi pembangunan ekonomi antarwilayah menghambat pemanfaatan potensi demografi secara optimal. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi Islam menekankan pengelolaan sumber daya manusia secara adil dan bertanggungjawab agar bonus demografi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru menambah beban kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nurhafizah dan Ade Yunita[105] yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa rasio ketergantungan akan menyebabkan kurangnya tingkat tabungan dan investasi yang berakhir pada meningkatnya angka kemiskinan.. Selain itu, hasil serupa juga ditemukan oleh penelitian Ginting,dkk.[106] yang membuktikan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap angka kemiskinan di Papua. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya beban ketergantungan akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya persentase kemiskinan.

[105] Nurhafizah dan Mafruhat, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019."

[106] Ginting et al., "The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua."

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai t statistik untuk variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tercatat sebesar -7,134860 dengan tingkat signifikansi 0,0000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Dengan kata lain, peningkatan UMK cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kenaikan UMK dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga secara tidak langsung turut mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Hasil t statistik untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka 0,740481 dengan nilai signifikansi sebesar 0,4603, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi tenaga kerja di sektor informal, meningkatnya jumlah pekerja setengah menganggur, serta tingginya angka pengangguran di kalangan masyarakat berpendidikan di wilayah tersebut.
3. Tercatat bahwa nilai t statistik untuk variabel Rasio Ketergantungan sebesar 5,665129, dengan tingkat signifikansi 0,0000 yang berada di bawah batas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi. Meskipun provinsi ini tengah berada dalam masa bonus demografi, belum seluruh wilayah mampu mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga kelompok usia produktif masih mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan kajian lebih lanjut, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel independen, yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Ketergantungan. Padahal,

kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti tingkat pendidikan, laju inflasi, serta efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial yang belum tercakup dalam analisis pada penelitian ini.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh dari sumber sekunder, terutama dari publikasi resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Walaupun data tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi, penggunaan data sekunder memiliki keterbatasan dalam menggambarkan secara mendalam dinamika sosial ekonomi yang terjadi di lapangan.
3. Penelitian ini terbatas pada rentang waktu selama lima tahun, yakni dari 2020 hingga 2024. Rentang tersebut tergolong masih pendek untuk dapat menangkap pola atau tren kemiskinan dalam jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Diharapkan dapat lebih memperhatikan penetapan upah minimum kabupaten/kota (umk) agar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, karena peningkatan UMK terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap sektor informal.
2. Bagi dinas tenaga kerja

   Perlu dilakukan adanya langkah nyata dalam mengurangi pengangguran, khususnya pengangguran terdidik dan setengah menganggur, dengan menyediakan pelatihan ketrampilan dan membuka akses informasi pasar kerja.
3. Bagi Lembaga Zakat dan Filantropi

   Lembaga zakat dan Filantropi Islam perlu mengoptimalkan peran instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam membantu masyarakat dengan beban tanggungan tinggi. Dana ZISWAF bisa disalurkan kepada kelompok miskin dalam bentuk modal usaha produktif, bantuan biaya pendidikan, maupun akses kesehatan yang layak, sehingga tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan jiwa dapat diwujudkan secara nyata.
4. Bagi Akademik dan peneliti selanjutnya

   Disarankan untuk memperluas variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, seperti inflasi, laju urbanisasi, serta kondisi infrastruktur. Selain itu, penelitian berikutnya

juga bisa menggunakan pendekatan pemetaan wilayah untuk melihat sebaran kemiskinan antar daerah secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Lisda, Mona Khairida Syafa, dan Ghina Rabban. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022." *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandangan* 1, no. 1 (2023): 27–39. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Aleffin, Girycki Sana, dan Niniek Imaningsih. "Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur." *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 2 (2024): 419–32. https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24860.

Alfajri, Sulthon Safiq. "Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)* 1, no. 4 (2024): 1316–29. https://doi.org/https://doi.org/10.70182/JCA.v1i4.24.

Algifari. *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11*. 1 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.

Ali Mauludi AC, Fadllan, dan Fitri Nur Rahmawati. "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2023): 68–83. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945.

Alifah, Khindya Indy, dan Niniek Imaningsih. "Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Tebuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 12, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1179.

Anggraini, Vidya, Sebastiana Viphindrartin, Edy Santoso, Rafael Purtomo Somaji, dan Nanik Istiyani. "Determinants of Poverty Levels in the Northern Coast of East Java." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 8, no. 1 (2023): 101–9. https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19792.

Anshori, Sri, Muslich, dan Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Univercity Press (AUP), 2009.

Ardian, Reki, Yulmardi Yulmardi, dan Adi Bhakti. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi." *Jurnal Ekonomi Aktual* 1, no. 1 (2021): 23–34. https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3.

Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Astuti, Wahyu Indri, Vita Ratnasari, dan Wahyu Wibowo. "Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 0–6. https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22977.

Ayu Permatasari, Sekar. "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2023" 17, no. 2 (2024): 2094–2104.

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024." Jakarta, 2024.

Basuki, Agus Tri, dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS)*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

BPS. *Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. *Katalog BPS*, 2016. https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3 BPS Potret Awal

TPB di Indonesia.pdf.

BPS Provinsi Jawa Tengah. *Profil Lansia Provinsi Jawa Tengah 2023*. *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Vol. 14, 2024.

———. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*. Vol. 50. BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Chairunnisa, Nurlaila Maysaroh, dan Yuha Nadhirah Qintharah. "Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7, no. 1 (2022): 147–61. https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530.

Darma, Reza Dwi, Fivien Muslihatinningsih, dan Moh. Adenan. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm Dan Dependency Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekuilibrium* 8, no. 1 (2024): 42. https://doi.org/10.19184/jek.v8i1.46023.

Desripa, Natalia, Guna Raj, Angeline Agnes Leonita, Christopher Powell, Franklin Fredrick, Felix Ivander Chou, Hendra Choandarta, dan Jacky Lie. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Analisis Kritis." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 7–12.

Faadihilah, Ghazy Faden, dan Wiwin Priana Primadha. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 5 (2023): 1794–1801. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462.

Fatoni, Nur. "DPU (DOMPET PEDULI UMAT) DAARUT TAUHID Peran Misykat Daarut Tauhid dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* V (2014): 77–92.

Fitriani, Ruslan, Herdi Budiman, Gusti Adi Wibawa dan Wayan Somayasa. "Pemodelan Angka Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel di Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika* 4 (2024): 652–62.

"Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024." Jakarta, 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1IzI=/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Ginting, Tiara Angel BR, I Ketut Sudibia, Ni Putu Martini Dewi, dan Agung Istri Ngurah Marhaeni. "The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 4, no. 6 (2020): 186–95. www.ajhssr.com.

Handani, Tia, dan Joko Suharianto. "Pengaruh TPT , PDRB , dan TPAK Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023" 3, no. April (2025): 22.

Hanifah, Siti, dan Nurul Hanifa. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan." *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 191–206. https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632.

Hasballah, Ibrahim. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota." *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 1 (2021): 38–48. https://www.researchgate.net/publication/362260656_Pengaruh_Tingkat_Pengangguran_Terbuka_Terhadap_Kemiskinan_Provinsi_Aceh_Di_KabupatenKota.

https://quran.kemenag.go.id/. “QS. An-Nahl Ayat 97,” n.d.

https://quran.kemenag.go.id/. “QS. At-Taubah Ayat 103,” n.d.

Iswahyudi, Adelia Nadiva, dan Niniek Imaningsih. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Rasio Ketergantungan , dan Indeks Kemahalan Konstruksi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw.” *Jambura Economic Education Journal* 7, no. 1 (2025): 210–24.

Junaidi, Bambang Juanda. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. PT Penerbit IPB Press, 2011.

Kuncoro, Mudjarad. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

———. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.

Listari, dan Asmuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Kerja Borongan Pada Bangunan Rumah.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2024): 42–51.

Luruk, Kristina. “Determinan Faktor Sosial Dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia Social And Economic Factors Determinants On Population Poverty In Indonesia.” *EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 4 (2021): 2503–3093.

Mahri, A. Jajang, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarok, Muhamad Fajri, Aizon, dan Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021. https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81.

Maskur, Sitti Rachma Ramadhani, Hasan Aedy, Zainuddin Saenong, Tajuddin, Saemu Alwi, dan La Ode Samsul Barani. “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021.” *Jurnal Progres Ekonomi Pembanguan* 8, no. 1 (2023): 82–95. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP.

Mochlasin, Mochlasin. “Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 239–58. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.239-258.

Mustofa, Muhamad Fahrul, dan Tris Utomo. “Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili.” *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 5 (2023): 1–17.

Nasri, Muhammad, Syamsu Nujum, dan Aryati Arfah. “Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan.” *SEIKO : Journal of Management & Business* 7, no. 2 (2024): 543–55.

Ningrum, Jahtu Widya, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda. “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 212. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034.

Nugroho, Iwan, dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 2004.

Nurhafizah, dan Ade Yunita Mafruhat. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 109–17. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402.

Nurhuda, Muh. Syukri, Idha Sari, dan Hendra. “Pengaruh Tenaga Kerja dan Dependency Ratio terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.” *EKALAYA: Jurnal Ekonomi*

Akuntansi 1 (2023): 1–8. www.depkeu.com.

Pemerintah Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan." *Jakarta* 53, no. 9 (2021): 6.

Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan." *Bpk Ri*, no. 1873884 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/270269/pp-no-51-tahun-2023.

Pradipta, Stepanie Ayu, dan Retno Mustika Dewi. "Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 3 (2020): 109–15. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115.

Prasasti, Suci, dan Teguh Erik Prakoso. "Karakter dan Perilaku Milenial: Peluang atau Ancaman Bonus Demografi." *jurnal Consilia* 3, no. 1 (2020): 10–22. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia.

Prayoga, Margaretha Larasati, Muchtolifah Muchtolifah, dan Sishadiyati Sishadiyati. "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo." *Jambura Economic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 135–42. https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058.

Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Analsisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1–8.

"QS. An-Nisa Ayat 9," n.d. https://quran.kemenag.go.id/.

Rambe, Syahril, Erwin Pinayungan Dasopang, dan Imran Ariadin. "Tafsir Ayat Alquran Tentang Tanggung Jawab Orang tua Dalam Mendidik Anak." *Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 2023, 205–22.

Rianda, Cut Nova. "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, no. 1 (2020): 17. https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358.

Rivana, Melda, dan Irwan Gani. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2024): 1–20.

Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015). https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Tri Koryati. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Siagian, Fenny Elfride, dan Made Kembar Sri Budhi. "Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 12, no. 11 (2023): 2319. https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i11.p20.

Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: ALFABETA, 2021.

Suparmono. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.

Susanto, Joko, dan Windyastuti Windyastuti. "Increasing the Minimum Wage As a Means of Poverty Alleviation." *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 7, no. 2 (2023): 72–87. https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.400.

Sutikno, Rizky Yulita, Debby Ch. Rotinsulu, dan Steeva Y.L. Tumangkeng. "Pengaruh Upah

Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 01 (2019): 88–98.

"Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023," 2025. https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyOCMy/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-tingkat-pendidikan-di-jawa-tengah.html.

"Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi," 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MSMy/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html.

Todaro, Michael P. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. 3 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

———. *Pembangunan Ekonomi 1*. Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Utami, Indah Tri, dan Mohammad Rofiuddin. "Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 2, no. 3 (2022): 145–60. https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.463.

Utari, Tri, Junaidi Junaidi, dan Hardiani Hardiani. "Pengaruh faktor-faktor kependudukan dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 8, no. 2 (2019): 82–95. https://doi.org/10.22437/jels.v8i2.11985.

Wikipedia. "Jawa Tengah," n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah.

Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, dan Apriza Apriza. "Pengangguran dalam Perspektif Islam." *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (2024): 90–100. https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.185.

Zaqiah, Ainil, Mike Triani, dan Isra Yeni. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 3 (2023): 33. https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Kabupaten/Kota	Tahun	X1(UMK)	X2 (TPT)	X3 (Rasio Ketergantungan)	Y (Kemiskinan)
Kab. Cilacap	2020	2158327	9,1	51,52	11,46
	2021	2228904	9,97	50,48	11,67
	2022	2230731	9,62	43,69	11,02
	2023	2383090	8,74	44,51	10,99
	2024	2479106	7,83	44,88	10,68
Kab. Banyumas	2020	1900000	6	49,85	13,26
	2021	1970000	6,05	49,47	13,66
	2022	1983261	6,05	46,31	12,84
	2023	2118124	6,35	45,5	12,53
	2024	2195690	6,18	45,75	11,95
Kab. Purbalingga	2020	1940800	6,1	52,18	15,9
	2021	1988000	6,05	50,51	16,24
	2022	1996814	5,23	46,95	15,3
	2023	2130981	5,61	46,44	14,99
	2024	2195571	4,96	46,56	14,18
Kab. Banjarnegara	2020	1748000	5,86	49,4	15,64
	2021	1805000	5,86	47,75	16,23
	2022	1819835	6,38	45,69	15,2
	2023	1958170	6,26	45,99	14,9
	2024	2038005	5,57	46,36	14,71
Kab. Kebumen	2020	1835000	6,07	56,01	17,59
	2021	1895000	6,03	54,61	17,83
	2022	1906781	5,92	46,38	16,41
	2023	2035890	5,11	46,01	16,34
	2024	2127641	5,07	46,39	15,71
Kab. Purworejo	2020	1845000	4,04	54,57	11,78
	2021	1905400	3,59	53,1	12,4
	2022	1911850	4,45	45,85	11,53
	2023	2043902	4,02	46,14	11,33
	2024	2121947	3,89	46,76	10,87
Kab. Wonosobo	2020	1859000	5,37	51,22	17,36
	2021	1920000	5,26	49,55	17,67
	2022	1931285	5,01	43,94	16,17
	2023	2076209	4,95	44,74	15,58
	2024	2159175	4,02	45,19	15,28
Kab. Magelang	2020	2042200	4,27	48,7	11,27

	2021	2075000	5,03	46,93	11,91
	2022	2081807	4,97	44,06	11,09
	2023	2236777	4,42	44,52	10,96
	2024	2316890	3,55	44,92	10,83
Kab. Boyolali	2020	1942500	5,28	51,33	10,18
	2021	2000000	5,09	49,69	10,62
	2022	2010299	4,92	46,46	9,82
	2023	2155712	4,05	46,67	9,81
	2024	2250327	3,16	47,02	9,63
Kab. Klaten	2020	1947821	5,46	49,01	12,89
	2021	2011515	5,48	47,98	13,49
	2022	2015623	4,31	44,84	12,33
	2023	2152323	4,2	44,39	12,28
	2024	2244012	3,97	44,67	12,04
Kab. Sukoharjo	2020	1938000	6,93	44,48	7,68
	2021	1986450	3,32	43,52	8,23
	2022	1998153	2,47	43,38	7,61
	2023	2138248	3,4	42,98	7,58
	2024	2215482	3,65	43,15	7,47
Kab.Wonogiri	2020	1797000	4,27	51,93	10,86
	2021	1827000	2,43	51,07	11,55
	2022	1839043	1,95	47,03	10,99
	2023	1968448	1,92	47,12	10,94
	2024	2047500	2,4	47,77	10,71
Kab. Karanganyar	2020	1989000	5,96	47,06	10,28
	2021	2054040	5,89	45,58	10,68
	2022	2064313	5,7	45,4	9,85
	2023	2207484	4,35	45,74	9,79
	2024	2288366	3,47	45,94	9,59
Kab. Sragen	2020	1815915	4,75	48,93	13,38
	2021	1829500	4,76	47,68	13,83
	2022	1839429	4,69	46,11	12,94
	2023	1969569	3,87	45,92	12,87
	2024	2049000	3,53	46,14	12,41
Kab. Grobogan	2020	1830000	4,5	48,28	12,46
	2021	1890000	4,38	46,53	12,74
	2022	1894032	4,4	43,87	11,8
	2023	2029569	4,02	44,75	11,72
	2024	2116516	3,23	45,36	11,43
Kab. Blora	2020	1834000	4,89	47,03	11,96
	2021	1894000	3,81	45,52	12,39
	2022	1904196	3,7	40,81	11,53
	2023	2040080	3,1	41,71	11,49
	2024	2101813	3,67	42,38	11,42
Kab. Rembang	2020	1802000	4,83	42,68	15,6

	2021	1861000	3,67	41,27	15,8
	2022	1874322	1,76	41,38	14,65
	2023	2015927	2,6	42,77	14,17
	2024	2099689	2,84	43,5	14,02
Kab. Pati	2020	1891000	4,74	45,78	10,08
	2021	1953000	4,6	44,37	10,21
	2022	1968339	4,45	41,67	9,33
	2023	2107697	4,29	42,66	9,31
	2024	2190000	3,87	43,19	9,17
Kab. Kudus	2020	2218452	5,53	40,91	7,31
	2021	2290995	3,77	39,58	7,6
	2022	2293058	3,21	40,7	7,41
	2023	2439814	3,25	41,64	7,24
	2024	2516888	3,19	42,1	7,23
Kab. Jepara	2020	2040000	6,7	46,86	7,17
	2021	2107000	4,23	45,08	7,44
	2022	2108403	4,1	42,78	6,88
	2023	2272627	3,35	43,05	6,61
	2024	2450915	3,34	43,25	6,09
Kab.Demak	2020	2432000	7,31	45,77	12,54
	2021	2511526	5,28	43,97	12,92
	2022	2513005	6,11	43,04	12,09
	2023	2680421	5,38	43,76	12,01
	2024	2761236	4,75	44,14	11,89
Kab. Semarang	2020	2229881	4,57	45,59	7,51
	2021	2302798	5,02	44,35	7,82
	2022	2311254	4,81	42,43	7,27
	2023	2480988	4,05	43,2	7,17
	2024	2582287	3,73	43,64	6,96
Kab.Temanggung	2020	1825200	3,85	46,51	9,96
	2021	1885000	2,62	45,24	10,17
	2022	1887832	2,54	44,15	9,33
	2023	2027569	2,32	44,79	9,26
	2024	2109690	2,35	45,23	8,67
Kab. Kendal	2020	2261775	7,56	45,31	9,99
	2021	2335735	7,55	44,41	10,24
	2022	2340312	7,34	40,66	9,48
	2023	2508300	5,76	41,73	9,39
	2024	2613573	5,01	42,27	9,35
Kab. Batang	2020	2061700	6,92	44,96	9,13
	2021	2129117	6,59	43,51	9,68
	2022	2135535	6,64	42,63	8,98
	2023	2282026	6,06	44,02	8,92
	2024	2379702	5,67	44,59	8,73
Kab. Pekalongan	2020	2018161	6,97	49,33	10,19

	2021	2084155	4,28	47,56	10,57
	2022	2094646	3,23	43,49	9,67
	2023	2247346	3,25	45	9,67
	2024	2334886	3,3	45,41	8,95
Kab. Pemalang	2020	1865000	7,64	51,21	16,02
	2021	1926000	6,71	49,75	16,56
	2022	1940890	6,63	43,79	15,06
	2023	2081783	6,55	43,71	15,03
	2024	2156000	6,63	44,17	14,92
Kab. Tegal	2020	1896000	9,82	50,63	8,14
	2021	1958000	9,97	48,33	8,6
	2022	1968446	9,64	44,06	7,9
	2023	2106238	8,6	44,19	7,3
	2024	2191161	7,53	44,43	6,81
Kab. Brebes	2020	1807614	9,83	49,11	17,03
	2021	1866723	9,78	47,81	17,43
	2022	1885019	9,48	43,8	16,05
	2023	2018837	8,98	43,44	15,78
	2024	2103100	8,35	43,75	15,6
Kota Magelang	2020	1853000	8,59	41,63	7,58
	2021	1914000	8,73	40,67	7,75
	2022	1935913	6,71	41,6	7,1
	2023	2066007	5,25	41,34	6,11
	2024	2142000	4,4	41,69	5,94
Kota Surakarta	2020	1956200	7,92	37,8	9,03
	2021	2013810	7,85	37	9,4
	2022	2035720	5,83	42,01	8,84
	2023	2174169	4,58	42,09	8,44
	2024	2269070	4,61	42,42	8,31
Kota Salatiga	2020	2034915	7,44	40,52	4,94
	2021	2101457	7,26	39,34	5,14
	2022	2128523	5,58	42,19	4,73
	2023	2284180	4,57	42,76	4,66
	2024	2378951	3,86	43,16	4,57
Kota Semarang	2020	2715000	9,57	38,89	4,34
	2021	2810025	9,54	37,16	4,56
	2022	2835021	7,6	40,43	4,25
	2023	3060349	5,99	40,38	4,23
	2024	3243969	5,82	40,66	4,03
Kota Pekalongan	2020	2072000	7,02	42,12	7,17
	2021	2139754	6,89	40,6	7,59
	2022	2156213	4,98	41,42	7
	2023	2305823	5,02	42,45	6,81
	2024	2389801	4,91	42,95	6,71
Kota Tegal	2020	1925000	8,4	42,79	7,8

	2021	1982750	8,25	41,18	8,12
	2022	2005930	6,68	42,11	7,91
	2023	2145012	6,05	42,98	7,68
	2024	2231628	5,88	43,37	7,64

Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif

Date: 06/17/25 Time: 21:12
Sample: 2020 2024

	LOGX1	X2	X3	Y
Mean	14.55730	5.401143	44.96234	10.70269
Median	14.54113	5.030000	44.52000	10.57000
Maximum	14.99231	9.970000	56.01000	17.83000
Minimum	14.37398	1.760000	37.00000	4.030000
Std. Dev.	0.107921	1.908634	3.317156	3.360536
Skewness	1.097498	0.570592	0.601220	0.199032
Kurtosis	4.655886	2.808957	3.686146	2.296355
Jarque-Bera	55.12474	9.762083	13.97564	4.765619
Probability	0.000000	0.007589	0.000923	0.092291
Sum	2547.528	945.2000	7868.410	1872.970
Sum Sq. Dev.	2.026579	633.8616	1914.613	1965.017
Observations	175	175	175	175

Lampiran 3 Hasil Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/17/25 Time: 21:28
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	136.5424	31.75236	4.300229	0.0000
LOGX1	-9.988057	2.076532	-4.809970	0.0000
X2	0.074728	0.103893	0.719274	0.4730
X3	0.426041	0.067549	6.307150	0.0000

Root MSE	2.583799	R-squared	0.405449
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.395018
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	2.613845
Akaike info criterion	4.782113	Sum squared resid	1168.303
Schwarz criterion	4.854451	Log likelihood	-414.4349
Hannan-Quinn criter.	4.811456	F-statistic	38.87061
Durbin-Watson stat	0.117252	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4 Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/17/25 Time: 21:27
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.304438	R-squared	0.991746
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.989517
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	0.344079
Akaike info criterion	0.893587	Sum squared resid	16.21944
Schwarz criterion	1.580798	Log likelihood	-40.18888
Hannan-Quinn criter.	1.172339	F-statistic	444.8870
Durbin-Watson stat	2.665441	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 5 Hasil Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/17/25 Time: 21:30
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	88.75430	11.19337	7.929184	0.0000
LOGX1	-5.628426	0.739727	-7.608790	0.0000
X2	0.020468	0.040264	0.508351	0.6119
X3	0.083904	0.014279	5.876000	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.478982	0.9811
Idiosyncratic random	0.344079	0.0189

Weighted Statistics

Root MSE	0.354614	R-squared	0.572297
Mean dependent var	0.663066	Adjusted R-squared	0.564793
S.D. dependent var	0.543787	S.E. of regression	0.358737
Sum squared resid	22.00641	F-statistic	76.26996
Durbin-Watson stat	1.978781	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 6 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	286.213411	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	748.492061	34	0.0000

Lampiran 7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.880561	3	0.0005

Lampiran 8 Hasil Estimasi Pemilihan Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/17/25 Time: 21:27
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

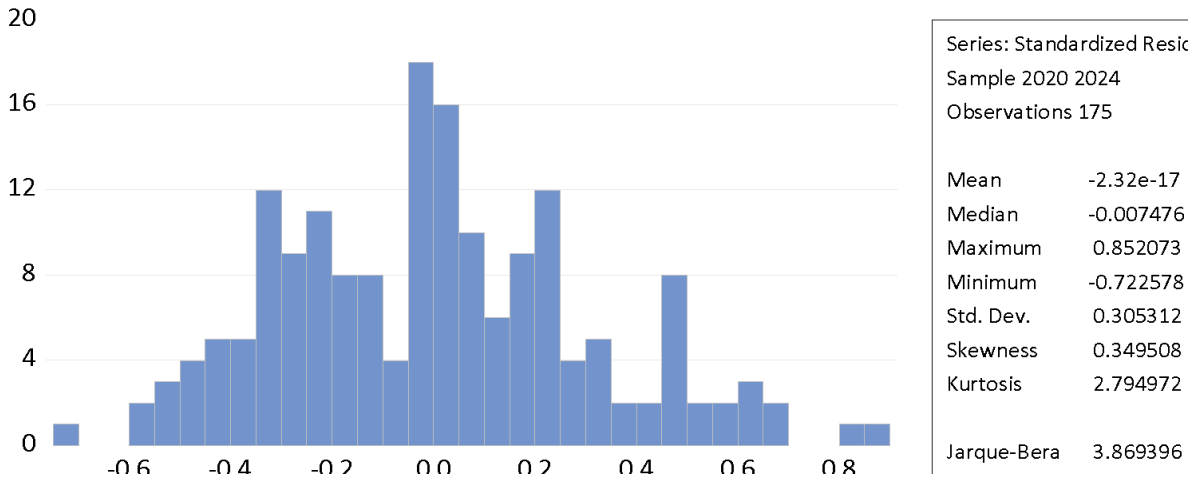
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.304438	R-squared	0.991746
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.989517
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	0.344079
Akaike info criterion	0.893587	Sum squared resid	16.21944
Schwarz criterion	1.580798	Log likelihood	-40.18888
Hannan-Quinn criter.	1.172339	F-statistic	444.8870
Durbin-Watson stat	2.665441	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas



Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas

	LOGX1	X2	X3
LOGX1	1.000000	0.034087	-0.466635
X2	0.034087	1.000000	-0.029627
X3	-0.466635	-0.029627	1.000000
Y	-0.515552	0.019049	0.568962

Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 06/17/25 Time: 21:08
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.574778	2.684892	1.703897	0.0907
LOG(X1)	-0.322334	0.177599	-1.814962	0.0717
X2	0.003565	0.009680	0.368296	0.7132
X3	0.004966	0.003364	1.476481	0.1421

Lampiran 12 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.48829	11.44065	7.472325	0.0000
LOGX1	-5.399442	0.756769	-7.134860	0.0000
X2	0.030543	0.041248	0.740481	0.4603
X3	0.081195	0.014332	5.665129	0.0000

Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.304438	R-squared	0.991746
Mean dependent var	10.70269	Adjusted R-squared	0.989517
S.D. dependent var	3.360536	S.E. of regression	0.344079
Akaike info criterion	0.893587	Sum squared resid	16.21944
Schwarz criterion	1.580798	Log likelihood	-40.18888
Hannan-Quinn criter.	1.172339	F-statistic	444.8870
Durbin-Watson stat	2.665441	Prob(F-statistic)	0.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri



Nama	: Anief Khaefatun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 18 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Jatirokeh, Kec. Songgom, Kab. Brebes
Email	: aniefnisa@gmail.com
No. Telepon	: 081476641954

B. Pendidikan

1. SDN 03 Jatirokeh
2. SMPN 02 Songgom
3. MAN 1 Tegal
4. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Ekonomi
2. Pengurus KPMDB UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis,

Anief Khaefatun Nisa

2105026072